

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH EKONOMI POLITIK**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
EKONOMI POLITIK	73124217	Mata Kuliah Wajib Prodi	3	3	16 April 2020
	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Kaprodi
	Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han)		Fransiskus Xaverius Gian Tue Mali, M.Si		Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL				
	<p>1. Sikap</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila; b. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; c. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. <p>2. Keterampilan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; b. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir; c. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data; d. mengelola pembelajaran secara mandiri; <p>3. Keterampilan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan mensistematisasi masalah politik pada tingkat lokal yang berkembang dalam masyarakat dari pemerintahan daerah; 				

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mampu merumuskan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam bidang politik lokal dan otonomi daerah, termasuk kekuatan dan kelemahan setiap pilihan, yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan kebijakan; c. Mampu membandingkan praktek politik lokal dan pemerintahan daerah, baik dimensi spasial (antar daerah, antarnegara, antarkomunitas, dan antarindividu) maupun dalam dimensi waktu; d. Mampu melakukan riset politik dengan menggunakan salah satu metode penelitian; e. Mampu menganalisis persoalan politik lokal dan pemerintahan daerah dengan berbagai teknik analisis; <p>4. Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai konsep praktik politik baik di tingkat lokal maupun pusat; b. Menguasai mekanisme sistem pemerintahan administrasi pada pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat; c. Menguasai teknik verifikasi konsep-konsep politik dan pemerintahan untuk memahami bekerjanya kekuasaan dalam realitas empiris; d. Menguasai substansi fatsun politik untuk memahami perilaku politik di tingkat lokal maupun pusat dalam kerangka otonomi daerah;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa mampu memahami munculnya studi ekonomi politik 2. Mahasiswa mampu memahami sejarah pemikiran dan perkembangan studi ekonomi politik 3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perspektif ekonomi sebuah negara dan kemunculan rezim ekonomi politik 4. Mahasiswa mampu memahami, menganalisa dan menjelaskan persoalan-persoalan yang kompleks dalam tatanan perekonomian sebuah negara
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini akan bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan faktor politik terhadap keputusan ekonomi. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menggunakan kerangka analisis ekonomi politik terhadap berbagai kasus makro dan mikroekonomi khususnya terhadap kegiatan pencari rente dan pelanggaran moral dalam pengambilan keputusan ekonomi. Antara lain dengan mempelajari sejarah dan lingkup ekonomi politik serta menganalisis kasus-kasus yang terjadi di Indonesia dan luar negeri. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami kaitan antara ekonomi dan politik.	
Referensi Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Brewer, Anthony, 2000, Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx, Teplok Press, Jakarta • Caporaso, James A. dan David P. 2015. Levine. Teori – teori Ekonomi Politik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar • Kuncoro, Mudrajad, 1997, Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), UPP AMP YKPN, Yogyakarta. • Lane, Jan Erik, dan Ersson, Svante, 2002, Ekonomi Politik Komparatif Demokratisasi dan Pertumbuhan Benarkah Kontradiktif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. • Mas'ood, Mochtar, 2000, Ekonomi-Politik, Birokrasi, dan Pembangunan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:	Perangkat keras:
	MS Windows MS Office Power Point MS Windows Media Player Internet Explorer	Laptop Spidol board marker Whiteboard Poster LCD

Matakuliah syarat								
-								
Mg Ke-	Sub-CP-MK (Kemampuan Akhir yang Direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran (Media dan sumber belajar)	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian		
						Kriteria	Indikator	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang CP mata kuliah dan cara pencapaiannya melalui proses pembelajaran dengan bahan kajiannya dalam satu semester	1. RPS, kontrak perkuliahan dan instrument penilaian	Ceramah dan diskusi	3 x 50 mnt	Mahasiswa memahami dengan baik tentang CP, proses pembelajaran dan perannya dalam pembelajaran, serta mampu Menyusun rencana belajar selama satu semester	Ketepatan dan kesuaian penganturan rencana belajar selama satu semester.	1. Perkenalan dosen dan mahasiswa di kelas 2. Latar belakang dan tujuan matakuliah 3. Pembahasan RPS 4. Penjelasan sistem penilaian 5. Pembuatan kontrak belajar untuk satu semester	5%
2	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang pemikiran ekonomi politik	1. Pengantar Ke Pemikiran Ekonomi Politik 2. Arti Penting ekonomi Politik 3. Klasifikasi system ekonomi dan kaitannya dengan politik 4. Kaitan antara ekonomi dengan Politik 5. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik	Ceramah, Diskusi dan Kuis	3 x 50 mnt	Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik konteks dan pemikiran ekonomi politik	Ketepatan dan penguasaan materi Kategori Non-test : Tugas review	1. Mampu merumuskan kembali kaitan antara ekonomi dan politik demikian pula sebaliknya 2. Mampu merumuskan Kembali definisi dan ruang lingkup dalam ekonomi politik secara rigid.	
3	Mahasiswa memahami berbagai pendekatan dalam Ekonomi Politik	1. Pendekatan Klasik dan Neo-Klasik 2. Pendekatan Keynesian 3. Pendekatan Marxian	Ceramah, dan Diskusi	3 x 50 mnt	Mahasiswa dapat memahami dan merumuskan berbagai pendekatan utama dalam memahami ekonomi politik	Ketepatan, meringkas dan menjelaskan	1. Memahami berbagai pendekatan dalam ekonomi politik 2. Memahami dan bisa menjelaskan perbedaan diantara sejumlah pendekatan.	10%

4	Mahasiswa memahami sejumlah teori ekonomi politik yang digunakan untuk menganalisa fenomena ekonomi politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Pilihan Publik 2. Teori Rent seeking 3. Teori Redistributive Combines 4. Teori Keadilan 	Ceramah, dan Diskusi	2 x 50 mnt	Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik teori ekonomi ekonomi politik	<p>Ketepatan, meringkas dan menjelaskan</p> <p>Non-test Review Analisa fenomena ekonomi politik menggunakan salah satu teori.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami berbagai teori yang digunakan dalam menganalisa fenomena ekonomi politik. 2. Memahami dan menjelaskan perbedaan diantara sejumlah teori tersebut 3. Menggunakan salah satu teori untuk menjelaskan fenomena ekonomi politik 	
5	Mahasiswa memahami cara kerja ekonomi dan mode produksi kapitalis (<i>Mode of Capitalist Production</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara kerja system ekonomi sederhana dan ideal 2. Mode produksi Kapitalis 3. Kelemahan dan kekurangan kapitalis 4. Kapitalisme dan Demokrasi 5. Ekonomi Politik Sosialisme 	Ceramah dan diskusi kelompok	3 x 50 mnt	Mahasiswa dapat menjelaskan cara kerja system ekonomi secara sederhana dan ideal serta mode produksi kapitalis.	Ketepatan, menjelaskan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami cara kerja system ekonomi secara sederhana dan ideal 2. Merumuskan Kembali cara kerja system ekonomu dengan memberikan contoh dalam praktik kehidupan sehari-hari 3. Menjelaskan mode produksi kapitalisme beserta dengan kekuarangan dan kelemahannya 4. Mambandingkan system ekonomi kapitalis dan sosialis 	20%
6	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbandingan pembangunan diantara negara-Negara berkembang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi negara berkembang 2. Karakter perbedaan pada negara berkembang 3. Keterbelakangan dan solusi bagi negara berkembang 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	3 x 50 mnt	Mahasiswa membuat studi kelompok yang menganalisa proses dan indicator pembangunan pada bidang ekonomi dan politik pada sejumlah negara berkembang	Ketepatan , menganalisis dan mengolah data serta mempertahankan argumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami pola pembangunan ekonomi dan politik pada sejumlah negara 2. Menjelaskan perbedaan karakter pada negara berkembang 	15%

							3. Memberikan Analisa terhadap sejumlah persoalan pembangunan pada negara berkembang	
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ekonomi politik Globalisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah kemunculan ekonomi politik globalisasi 2. Globalisasi dan lahirnya actor ekonomi internasional baru 3. Perspektif ekonomi Globalisasi/ Ekonomi Politik Internasional 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	3 x 50 mnt	Mahasiswa membuat studi kelompok yang menganalisa sejumlah actor yang terlibat dalam ekonomi globalisasi/Ekonomi Politik Internasional	Ketepatan, menjelaskan dan menganalisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan sejarah, definisi dan actor dalam ekonomi politik Globalisasi. 2. Menganalisa fenomena ekonomi politik Internasional menurut berbagai pendekatan dan teori 	
8	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ekonomi politik radikal dengan pendekatan strukturalisme dan dependensia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah berkembangnya ekonomi politik radikal 2. Pendekatan ekonomi strukturalisme 3. Pendekatan ekonomi politik dependensia 4. Pembangunan di Negara Maju 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	3 x 50 mnt	Mahasiswa memahami dan menjelaskan ekonomi politik radikal melalui pendekatan strukturalisme dan dependensia melalui studi kelompok	Ketepatan menjelaskan dan menganalisa serta mempertahankan argumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan menjelaskan ekonomi politik radikal 2. Memahami dan menjelaskan pendekatan ekonomi strukturalisme dengan menganalisa fenomena ekonomi politik 3. Memahami dan menjelaskan pendekatan ekonomi dependensia dengan menganalisa fenomena ekonomi politik 	
9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pendekatan ekonomi politik kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi ekonomi politik kelembagaan 2. Ekonomi politik kelembagaan vs ekonomi murni 3. Peran nilai dan norma, kewirausahaan serta hukum dalam ekonomi politik kelembagaan 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	2 x 50 mnt	Mahasiswa membuat studi kelompok untuk menjelaskan ekonomi kelembagaan yang berupa ciri-ciri maupun bentuknya dalam fenomena ekonomi politik	Ketepatan menjelaskan dan menganalisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami bentuk, ciri-ciri dan sejumlah faktor penting yang berperan dalam ekonomi kelembagaan 2. Menjelaskan berbagai bentuk kelembagaan pada ekonomi politik 	10%

		4. Bentuk Kelembagaan dalam ekonomi politik						
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan ekonomi politik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi Politik Indonesia dari masa ke masa (Orde lama, orde baru, dan reformasi) 2. Ekonomi politik dan politik ekonomi 3. Kebijakan ekonomi kerakyatan 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	2 x 50 mnt	Mahasiswa mendapatkan penjelasan dan studi kelompok untuk menganalisa perbedaan bentuk ekonomi politik Indonesia pada masa orde lama, orde baru serta reformasi	Ketepatan menjelaskan dan menganalisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami dan menjelaskan kondisi ekonomi politik ke Indonesia dari masa ke masa 2. Memahami dan menjelaskan ekonomi politik kerakyatan sebagai ciri utama 	10%
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perkembangan ekonomi politik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Studi kasus perkembangan ekonomi politik di Indonesia 2. Gelombang privatisasi BUMN di Indonesia 3. Reformasi eksistensi BUMN 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	2 x 50 mnt	Mahasiswa memahami perkembangan ekonomi politik di Indonesia dengan melihat BUMN sebagai objek studi kasus	Ketepatan penjelasan dan analisa	BUMN sebagai salah satu pendekatan ekonomi politik	
12	Mahasiswa memahami pembangunan sector keuangan sebagai bagian dari perkembangan ekonomi politik di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan sector keuangan 2. Krisis ekonomi, pemulihan ekonomi dan Lembaga keuangan. 	Ceramah Dosen, Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab	2 x 50 mnt	Mahasiswa memahami berbagai fenomena pembangunan sector keuangan sebagai bagian perkembangan ekonomi politik di Indonesia.	Pemahaman, ketepatan menjelaskan dan analisa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan sector keuangan 2. Krisis ekonomi, pemulihan ekonomi dan Lembaga keuangan. 	

13	Mahasiswa memiliki pemahaman tentang otonomi daerah dan pemerataan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Otonomi daerah dan pemerataan ekonomi Hubungan fiskal pusat dan daerah Perimbangan keuangan pusat dan daerah 	Presentasi Kelompok, dan Tanya jawab		Mahasiswa memahami otonomi daerah dan pemerataan ekonomi melalui hubungan fiskal antara pusat dan daerah	Pemahaman, ketepatan menjelaskan dan analisa	<ol style="list-style-type: none"> Otonomi daerah sebagai implikasi politik terhadap ekonomi Pendekatan ekonomi politik dalam mengatur hubungan fiskal antara pusat dan daerah Faktor ekonomi politik dalam politik anggaran. 	10%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan sejumlah Analisa terkait isu spesifik dalam ekonomi politik di Indonesia	Presentasi kelompok terkait dengan tema “kajian ekonomi politik dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia : Pertumbuhan vs pemerataan”	Diskusi dan tanya jawab.		Mahasiswa membentuk studi kelompok dan menganalisa tema terkait dalam pendekatan dan teori ekonomi politik lalu mempresentasikan hasil analisa	Ketepatan menjelaskan dan menganalisa serta mempertahankan argumen		10 %
15	Mahasiswa mampu menjelaskan sejumlah Analisa terkait isu spesifik dalam ekonomi politik di Indonesia	Presentasi kelompok dengan tema “ Desentralisasi Fiskal dan pembangunan di daerah”	Diskusi dan tanya jawab.		Mahasiswa membentuk studi kelompok dan menganalisa tema terkait dalam pendekatan dan teori ekonomi politik lalu mempresentasikan hasil analisa	Ketepatan menjelaskan dan menganalisa serta mempertahankan argumen		
16	Evaluasi Akhir Semester (EAS) dengan tes tulis berupa pembuatan karya tulis ilmiah							

SISTEM PENILAIAN

I. PERSYARATAN UMUM

A. Kehadiran:

1. Jumlah kuliah tatap muka per semester yang harus dihadiri oleh mahasiswa/i adalah 16 pertemuan.
2. Batas toleransi kehadiran mahasiswa/i 75 % dari total jumlah pertemuan.
3. Kriteria ketidakhadiran mahasiswa/i adalah: S (sakit) ditandai dengan surat keterangan dokter, I (Ijin) ditandai dengan surat ijin resmi, dan A (Alpa), maksimal 4x pertemuan kelas.
4. Mahasiswa aktif dan partisipatif mengikuti ibadah keluarga besar UKI dan tidak diperkenankan melakukan kegiatan lain selama ibadah berlangsung.
5. Toleransi keterlambatan perkuliahan (dosen + mahasiswa/i) setiap tatap muka adalah 15 menit. Jika setelah 15 menit dosen + mahasiswa/i tidak hadir maka perkuliahan dibatalkan. (kecuali ada persetujuan atau ada masalah tertentu).

B. Perkuliahan:

1. Mata kuliah yang dilaksanakan mahasiswa berbasis KKNI.
2. Mata kuliah berbasis KKNI dinilai/dievaluasi per topik yang telah tuntas
3. Persentase penilaian/evaluasi ditentukan oleh dosen yang bersangkutan sesuai kompetensi MK dan capaian pembelajaran.
4. Tidak diperkenankan meninggalkan kelas selama perkuliahan tanpa ijin oleh dosen.
5. Mahasiswa tidak diijinkan membuka HP saat proses belajar mengajar berlangsung tanpa ijin oleh dosen.
6. Mahasiswa memakai busana yang sopan.
7. Tidak membuat kegaduhan selama proses pembelajaran berlangsung.

C. Kejahatan akademik: plagiarisme Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010:

“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.” (Permendik No 17 Tahun 2010 dan Panduan Anti Plagiasime terlampir).

Sanksi sesuai Permendik No 17 Tahun 2010 Pasal 12:

1. Teguran;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

II. PERSYARATAN KHUSUS

A. Tugas dan Tanggung jawab mahasiswa/i

Pada setiap tatap muka mahasiswa/i diwajibkan berpartisipasi aktif dalam proses perkuliahan melalui hal-hal berikut

1. Presentasi: mahasiswa/i wajib berpartisipasi aktif dalam diskusi yang diadakan dalam setiap tatap muka sesuai kebutuhan materi perkuliahan (lihat RPS).
2. Tugas Mandiri: mahasiswa/i wajib mengerjakan tugas mandiri dalam bentuk review materi kuliah yang telah diberi tanda bintang pada referensi yang digunakan di RPS.
3. Tugas terstruktur: mahasiswa/i wajib membentuk kelompok untuk mendiskusikan berbagai fenomena politik yang berhubungan dengan ekonomi politik

B. Gaya Selingkung Pengerjaan Tugas

1. Untuk mengerjakan tugas review, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan (1 hal), Pembahasan (2 hal), Kesimpulan (½ hal).
 - b. Daftar referensi minimal menggunakan 3 buku dan 2 jurnal ilmiah.
 - c. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “Chicago Manual Style” (terlampir).
 - d. Ketentuan kertas A4, huruf Cambria, ukuran jenis 12, spasi 1½.
2. Untuk mengerjakan tugas makalah kelompok, mahasiswa/i wajib mematuhi ketentuan berikut:
 - a. Artikel mahasiswa/i harus ditulis dengan komposisi: Pendahuluan berisi permasalahan dan pentingnya isu/fenomena tersebut dibahas (2 hal), Tinjauan Teoritis berisi teori apa yang hendak digunakan sebagai pisau analisis (2 hal), Pembahasan (5 hal), Kesimpulan (1 hal).
 - b. Daftar referensi minimal menggunakan 5 buku dan 10 jurnal ilmiah.

- c. Pengutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan “APA (American Psychological Association).
- d. Ketentuan kertas A4, jenis huruf Cambria, ukuran 12, spasi 1½.

III. Skala nilai akhir dalam huruf dan angka:

Nilai Akhir (NA)	Nilai Huruf (NH)	Nilai Mutu (NM)
80,0-100,0	A	4,0
75,0-79,0	A-	3,7
70,0-74,9	B+	3,3
65,0-69,9	B	3,0
60,0-64,9	B-	2,7
55,0-59,9	C	2,3
50,0-54,9	C-	2,0
45,0-49,9	D	1,0
<44,9	E	0

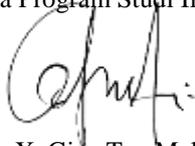
Prosentase Tahap Penilaian Tugas dan kewajiban mahasiswa (dapat diganti/disesuaikan oleh dosen)

Kehadiran	5 %
Tugas Mandiri dan kelompok (Diskusi Dan Makalah)	65 %
Ujian Tengah Semester (UTS)	10 %
Ujian Akhir Semester (UAS)	20 %

Jakarta, 16 April 2020

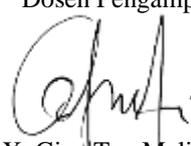
Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Politik



Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom, M.Si

Dosen Pengampu



Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.Ikom, M.Si

Daftar Hadir

Tahun Akademik / Semester

Program Studi

Mata Kuliah

Jumlah SKS

Kelas

Jadwal

Jumlah Mahasiswa

Tahun Akademik 2020/2021 / Semester Genap

731 - Ilmu Politik - S1

Ekonomi Politik (73124127)

3 SKS

A

Senin, 11:00 - 13:30 | Ruang Kuliah

11 Mahasiswa

[← Kembali](#) [+ Buat Daftar Kehadiran](#)

Pertemuan #1: 01-Mar-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #2: 22-Mar-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #3: 29-Mar-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #4: 12-Apr-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 4, Tidak Hadir: 2, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #5: 10-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #6: 04-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 10, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #7: 27-Apr-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 10, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #8: 19-Apr-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 10, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #9: 17-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 9, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 1) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #10: 31-May-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 10, Tidak Hadir: 1, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #11: 14-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #12: 28-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 6, Tidak Hadir: 4, Sakit: 2, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #13: 07-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #14: 21-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si
Pertemuan #15: 24-Jun-2021 11:00 - 13:30	(Hadir: 11, Tidak Hadir: 0, Sakit: 0, Izin: 0) Fransiskus X G Tue Mali, S.Ikom., M.Si

Rekap Kehadiran Mahasiswa

No	NIM	Nama	Tidak Hadir	Sakit	Izin	Hadir	Total Pertemuan	Persentase Kehadiran %
1	1773150003	Yustinus Gebze	1	0	0	3	4	75
2	1973150015	Sm. Angelina Sabeleake	1	0	0	10	11	90,91
3	1973150014	Alexsius Salakkopak	0	0	0	11	11	100
4	1973150013	Rapta Mardina Saogo	0	0	0	11	11	100
5	1973150008	Tiur Paulinawati	1	1	0	13	15	93,33
6	1973150012	Fernando Salolit	0	1	0	7	8	100
7	1973150006	Daniel L. Sipahutar	1	0	0	14	15	93,33
8	1973150001	Adrian Alexsander	0	0	0	15	15	100
9	1873150004	Venny Yolanda	0	0	0	15	15	100
10	1973150010	Pendiron Indra Enumbi	0	0	2	9	11	100
11	1973150011	Sahat M. Tampubolon	8	0	0	7	15	46,67
12	1773150901	Olsavira N. Surono	0	0	0	15	15	100



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Mata Kuliah	: Ekonomi Politik
Hari/Tanggal	: 19 April 2021
Kelas	: A
Dosen	: Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Waktu	:
Sifat Ujian	: Terbuka

Mahasiswa menjelaskan praktek di Indonesia dari masalah teori dibawah ini :

1. Teori Pilihan Publik
2. Teori Rent seeking
3. Teori Redistributive Combines
4. Teori Keadilan

Masalah yang diidentifikasi dari teori tersebut kemudian dijelaskan solusinya berdasarkan usulan teori tersebut.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Mata Kuliah	: Ekonomi Politik
Hari/Tanggal	: 24 Juni 2021
Kelas	: A
Dosen	: Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si
Waktu	:
Sifat Ujian	: Terbuka

Mahasiswa menyusun paper tentang praktek ekonomi politik kelembagaan di Indonesia dari perspektif:

1. Nilai dan norma
2. Hukum
3. Sosial budaya

Aspek yang dijelaskan adalah *pengaruh kelembagaan tersebut terhadap perilaku ekonomi politik, dan unsur-unsur yang melengkapi dan menjadi ciri karakteristik itu sendiri.*

HASIL PERKULIAHAN/PENILAIAN MAHASISWA

NIM	Nama_Mahasiswa	UTS	UAS	Tugas	Keaktifan	Nilai Akhir	Grade
1773150003	Yustinus Gebze	0	0	0		0	E
1773150901	Olsavira N. Surono	80	70	78	85	76,9	A-
1873150004	Venny Yolanda	83	75	80	70	78,4	A-
1973150001	Adrian Alexsander	85	75	87	70	81,1	A
1973150006	Daniel L. Sipahutar	80	72	75	80	76,1	A-
1973150008	Tiur Paulinawati	85	80	88	70	82,9	A
1973150010	Pendiron I. Enumbi	68	86	77	90	78,3	A-
1973150011	Sahat M. Tampubolon	0	0	0	0	0	E
1973150012	Fernando Salolit	70	65	78	66	70,5	B+
1973150013	Rapta Mardina Saogo	76	60	71	60	68,1	B
1973150014	Alexsius Salakkopak	70	80	79	67	75,4	A-
1973150015	Sm. Angelina Sabeleake	70	60	70	60	66	B

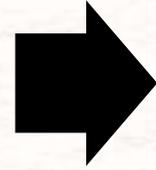
EKONOMI POLITIK

ARTI PENTING EKONOMI POLITIK

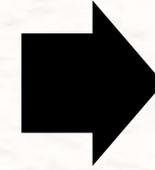
- Ekonomi politik dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menilai setiap gejala sosial.
- Struktur sosial terstratifikasi berdasarkan pola produksi dan pertukaran barang, yang dapat juga memicu terjadinya perubahan sosial
- Adanya keterkaitan faktor-faktor produksi, keuangan, perdagangan dengan kebijakan pemerintah di moneter, fiskal, dan komersial
- 2 aspek berkenaan ekonomi politik : **kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi** dan **kepentingan politik dalam bidang ekonomi**. 2 aspek ini tujuan idealnya adalah kesejahteraan nasional sebuah negara.

SEJARAH EKONOMI POLITIK

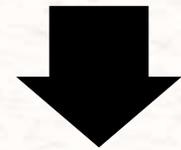
Abad 14-16
Transformasi
ekonomi Eropa
terhadap ekonomi
feodal



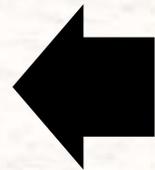
Munculnya ekspresi
bagi aspirasi
individu dan
menguatnya jiwa
kewirausahaan yg
sebelumnya ditekan



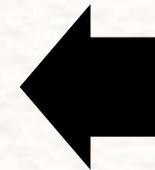
Lahirnya
rasionalisme
sehingga penekanan
terhadap ilmu
pengetahuan
semakin kuat



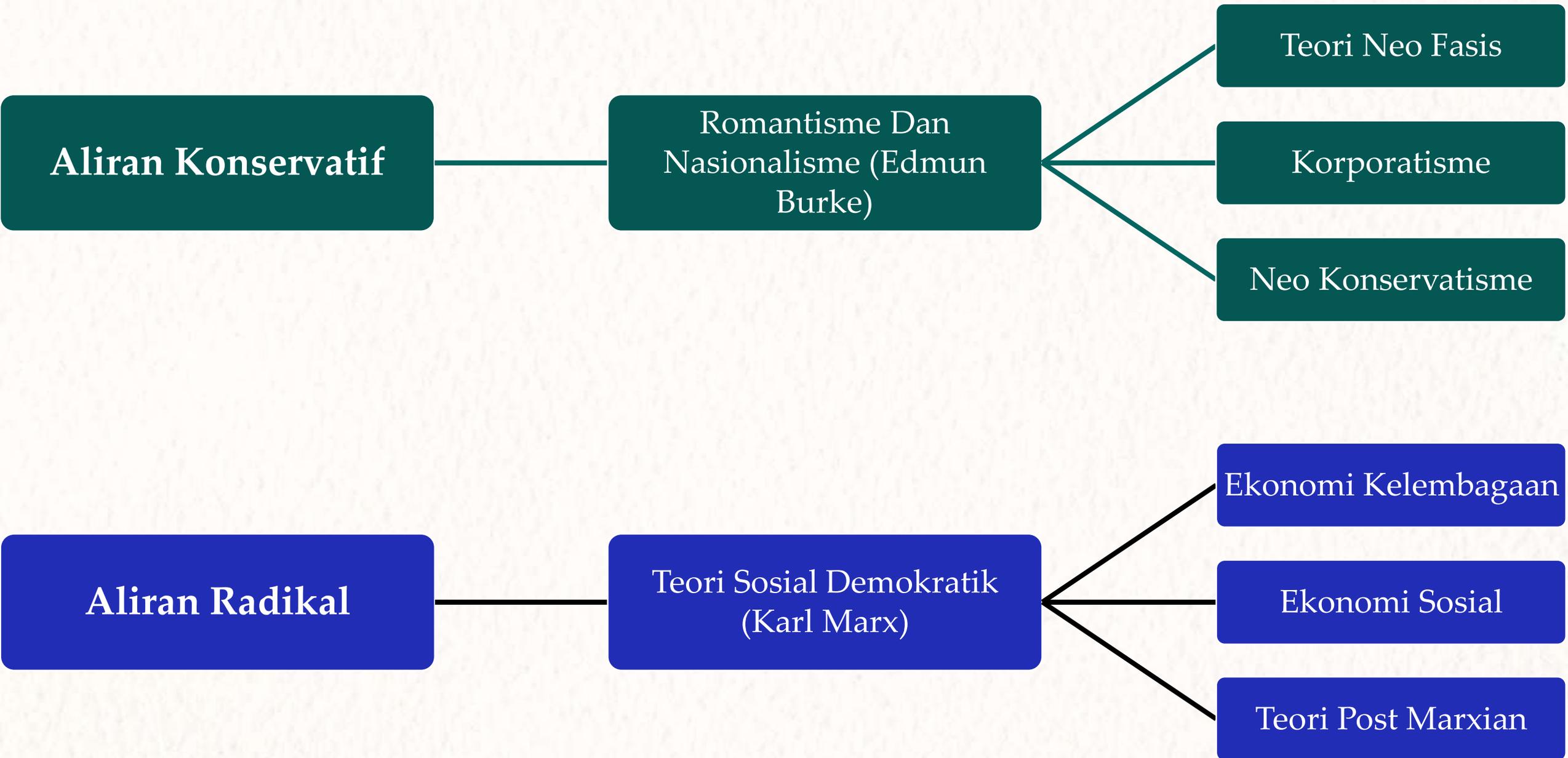
Lahir 3 mazhab :
1. Aliran ekopol
konservatif
2. Aliran ekopol
klasik
3. Aliran ekopol
radikal

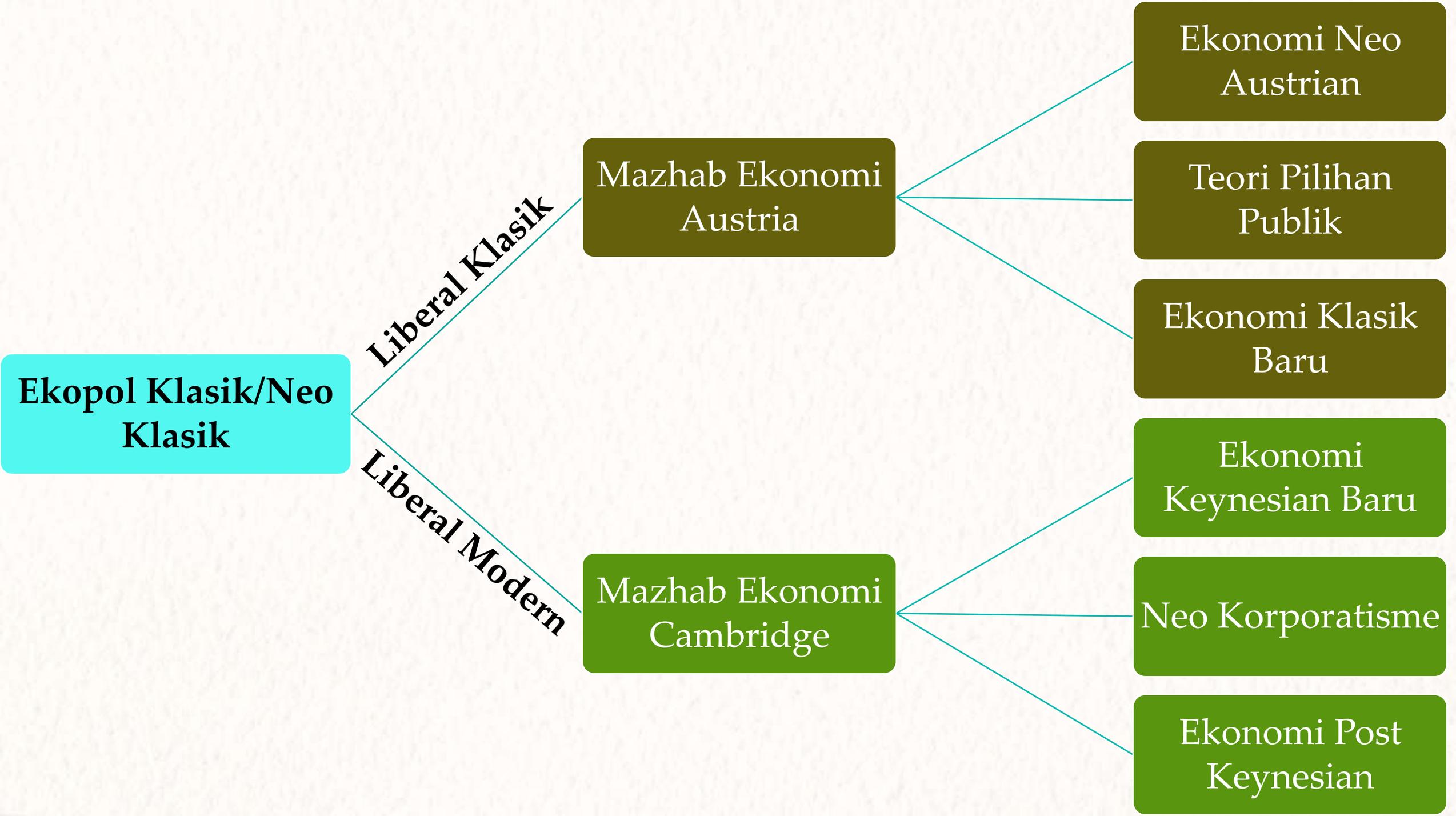


Akhir abad 18
pemikiran ini
ditentang → negara
dianggap
menghambat
kesejahteraan



Pada masa ini negara
diberi wewenang
memberikan
perlindungan,
pengawasan produk





KLASIFIKASI SISTEM EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK

Terbagi Dalam 3 Klasifikasi :

1. Organisasi Pengaturan/Pengambilan Keputusan :

- **Sentralisasi** : keputusan ekonomi ditentukan oleh otoritas pusat
- **Desentralisasi** : keputusan ekonomi ditentukan oleh level/unit ekonomi yg lebih rendah (rumah tangga dan perusahaan individu) yg relatif bebas dari otoritas pusat

2. Mekanisme Penyebaran Informasi Dan Koordinasi

- **Mekanisme perencanaan** : sistem ekonomi dikatakan sebagai sistem perencanaan jika informasi dan keputusan2 ekonomi disebarakan sesuai instruksi/komando badan superior (pemerintah)
- **Mekanisme pasar** : jika penyebaran informasi dan koordinasi keputusan2 ekonomi dilaksanakan berdasarkan tekanan permintaan dan penawaran

KLASIFIKASI SISTEM EKONOMI DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK

3. Kepemilikan Kekayaan Produktif :

- Sebagian besar kekayaan produktif dimiliki oleh **swasta (privat)** seperti yg dijumpai dalam sistem kapitalis
- Sebagian besar kekayaan produktif adalah milik **negara – otoriter** atau bekas komunisme Uni Soviet
- Sebagian besar kekayaan produktif milik **kolektif atau kooperatif - sosialis**

ILMU EKONOMI VS ILMU EKONOMI POLITIK

ILMU EKONOMI

Mempelajari pemenuhan kebutuhan manusia, produksi, konsumsi dari perspektif penggunaan modal ekonomis seperti tanah, tenaga kerja dan proses produksi dan distribusi melalui pasar.

ILMU EKONOMI POLITIK

Meletakkan Ekonomi sebagai pergumulan antara kebijakan negara, politik, hukum, lingkungan sosial dan ideologi politik dengan proses ekonomi konvensional

Persamaan Dan Perbedaan Ilmu & Ilmu Ekonomi Politik

Persamaan

1. sama2 membahas bagaimana mengalokasikan Sumber daya yg terbatas secara efisien sehingga menghasilkan output yg optimal
2. Menyusun formulasi kerja sama ataupun kompetisi secara detail sehingga tidak menimbulkan konflik

Sama2 berdasarkan pada kondisi keterbatasan sumber daya yg terbatas

Perbedaan

1. Ekopol berfokus pada insentif dari hasil transaksi dan pemberian informasi yg lengkap. Teori ekonomi hanya membahas transaksi
2. Teori ekonomi membahas harga dan pergerakan pasar. Ekopol menciptakan infrastruktur pendukung, jaminan keamanan dan melahirkan regulasi → batas harga, pajak, subsidi, kontrak, lelang, kredit, dsb.

Teori Ekonomi dan Teori Ekopol

Memfokuskan perhatian pada isu-isu sbb; mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan menyediakan kepuasan bagi kepentingan dan keinginan manusia

KAITAN ANTARA EKONOMI DAN POLITIK

EKONOMI

1. Ekonomi sebagai “**Cara**” melakukan sesuatu seperti dalam istilah “ekonomis” atau “kalkulasi ekonomi” yg konotasinya adalah efisiensi → maka politik hanya menjadi tempat dimana kalkulasi dilakukan
2. Ekonomi sebagai “**aktifitas**” yg biasanya ditujukan untuk memperoleh sesuatu yg diinginkan → maka politik dan ekonomi ada di tempat berbeda
3. Ekonomi sebagai “**institusi**” seperti dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando → maka ekonomi sebagai bagian dari ruang sosial politik

KAITAN ANTARA EKONOMI DAN POLITIK

POLITIK

1. **Politik sebagai pemerintahan** : mencakup sebagai **organisasi, aturan-aturan dan keagenan** (*organization, rules, & agency*). **Organisasi** merujuk pada struktur yg kongkret (pengadilan, badan logistik, birokrasi, dan partai politik). **Aturan-aturan** merujuk pada hak dan kewajiban termasuk prosedur dan strategi. **Keagenan** merujuk pada perannya sebagai aktor perubahan dan kemajuan.
2. **Politik sebagai pengatur kehidupan publik** : merujuk pada peristiwa yg melibatkan banyak orang. Kebijakan publik tujuannya adalah kesejahteraan umum, yg juga adalah tujuan ekonomi sosial (secara luas)
3. **Politik sbg otoritas pengalokasian** : merujuk pada peran politik dalam pengambilan keputusan ttg produksi dan pendistribusian nilai-nilai

HUBUNGAN SISTEMATIS ANTARA EKONOMI DAN PROSES POLITIK

1. **Hubungan Deterministik** : asumsinya bahwa ada hubungan determinasi antara ekonomi dan politik, dimana politik menentukan aspek-aspek ekonomi dan institusi ekonomi menentukan proses-proses politik.
2. **Hubungan Interaktif** : asumsinya fungsi-fungsi ekonomi dan politik saling berbeda, namun saling mempengaruhi.
3. **Hubungan Kontinyu** : asumsinya ekonomi dan politik memiliki hubungan perilaku yg berlanjut atau kontinyu.

DEFENISI EKONOMI POLITIK

- **Strailand** : Ekopol merupakan sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Menurutnya ekopol mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial, berupa kemiskinan dan perilaku eksploitatif oleh kelompok yang kuat.
- **Caporaso & Levine** : Peran institusi politik dalam membuat, mempengaruhi perubahan kebijakan politik dengan memasukkan analisis ekonomi, baik untuk kepentingan kelompoknya atau masyarakat.
- **Yustika** : Ekopol mengaitkan seluruh penyelenggara politik, baik aspek, proses maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang harus dilakukan oleh masyarakat maupun yang diintrodusir oleh pemerintah. Pendekatan ini meletakkan bidang politik subordinat terhadap ekonomi, yaitu bahwa instrumen-instrumen ekonomi seperti mekanisme pasar, harga, dan investasi dianalisis dengan menggunakan setting sistem politik dimana peristiwa ekonomi terjadi.

EKONOMI POLITIK VS POLITIK EKONOMI

EKONOMI POLITIK

Cenderung sebagai tinjauan ekonomi yang melihat politik adalah alat untuk mencapai keuntungan maksimal (Efisiensi)

POLITIK EKONOMI

Cenderung sebagai tinjauan politik yang melihat ekonomi adalah alat untuk mencapai kekuasaan dan kepentingan (Efektif)



Melihat ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif

TERMINOLOGI EKOPOL

Bentuk sistem yang diterapkan oleh suatu negara yang berpengaruh pada sistem ekonomi yaitu **Sistem Ekonomi Politik Kapitalisme** dan **Sistem Ekonomi Politik Sosialisme**

Produk dari studi ekonomi politik adalah kebijakan publik
(public policy)

RUANG LINGKUP EKONOMI POLITIK

1. Kebijakan Ekonomi
 2. Strategi pembangunan
 3. Keberpihakan
 4. Ide ide dasar kesejahteraan
 5. Paradigma Pembangunan
- 

PENGARUH KEKUASAAN POLITIK

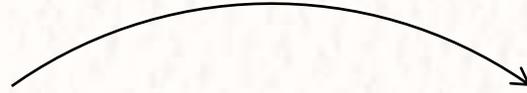
POLITIK

1. Arah Ekonomi
2. Besaran Ekonomi
3. Mekanisme
4. Distribusi
5. Kontrol Ekonomi oleh Negara
6. Pasar - harga

EKONOMI

PENDEKATAN EKONOMI POLITIK

PENDEKATAN



Politik

ekonomi

PENDEKATAN



PENDEKATAN UTAMA EKOPOL

- 1. Pendekatan Klasik / Neo Klasik**
- 2. Pendekatan Keynesian**
- 3. Pendekatan Marxian**

A. PENDEKATAN KLASIK / NEO KLASIK

Ekopol Klasik : Liberalisme Awal

Neo Klasik : Neo Liberalisme

Perkembangan awal ideologi liberal erat kaitannya dengan pemikiran yang berkembang dan lahir pada masa pencerahan dan Revolusi Perancis pada akhir abad 18. Meskipun begitu embrio liberal telah ada sejak tahun 1215, ketika tuntutan kaum petani dan pemilik tanah non bangsawan di Inggris terhadap dominasi kaum aristokrat dalam bidang ekonomi, hingga dibuatnya aturan yang disebut Magna Charta. Ruang besar bagi pemikiran liberal semakin menguat hingga akhir abad 15 ketika gerakan tuntutan reformasi agama menguat di Jerman. Dari 2 peristiwa ini hakikatnya didasarkan pada keinginan masyarakat Eropa saat itu untuk menikmati kebebasan, atau keluar dari kukungan perselingkuhan gereja Katolik Roma dan monarki absolut yang otoriter.

A. PENDEKATAN KLASIK / NEO KLASIK

MAKNA KEBEBASAN (LIBERAL) MENURUT ADAM SMITH:

1. **Buruh atau pekerja:** bebas untuk memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
2. **Produsen:** bebas memilih jenis usaha yang akan diproduksinya sesuai kecakapan yang dimiliki serta bebas menentukan dimana tempat produksi itu dilakukan.
3. **Pemilik modal:** bebas memilih melakukan investasi pada jenis usaha apa yang diinginkan berdasarkan kepentingannya, pengalamannya, serta kecakapannya dalam membaca kebutuhan konsumen.
4. **Konsumen:** bebas mengkonsumsi barang atau jasa apa yang dipilihnya di pasar berdasarkan kebutuhannya dan peminatannya.

A. PENDEKATAN KLASIK / NEO KLASIK

Gerakan liberal semakin mengemuka di Eropa hingga diterbitkannya buku *The Wealth of Nations* karya Adam Smith, seorang pemikir Skotlandia. Namun selain Smith ada beberapa pemikir lain yang turut mempengaruhi pengembangbiakan ideologi ini diantaranya, J. R. McCulloch, Nassau William Senior, J. B Say, David Ricardo, dan Robert Torrens. Buku ini menjadi penanda lahirnya konsep liberalisme klasik atau bentuk kapitalisme awal.

Tesis pemikiran para pemikir liberalisme klasik ditujukan pada beberapa hal, yaitu;

- Menghapus sistem merkantilisme yang ketinggalan zaman
- Menghapus dominasi Gereja Katolik sebagai pemilik harta kekayaan dan lembaga ekonomi
- Menuntut pengurangan kekuasaan monarki atau menghapusnya sama sekali
- Menghapus hak-hak istimewa kaum bangsawan
- Menghendaki adanya lembaga parlementer sebagai pengganti monarki yang dikontrol masyarakat.
- Sistem ekonomi perdagangan bebas, semua orang mendapatkan perlakuan yang sama

A. PENDEKATAN KLASIK / NEO KLASIK

Pendekatan ini adalah pemicu utama lahirnya sistem kapitalis, dgn asumsi umumnya :

Kegiatan ekonomi digerakkan dan di koordinasikan oleh pasar, dengan instrumen fluktuasi harga sebagai penentu *demand and supply* (sinyal harga)

Pelaku ekonomi bebas keluar masuk pasar

Setiap individu memiliki hak kepemilikan dalam melakukan transaksi

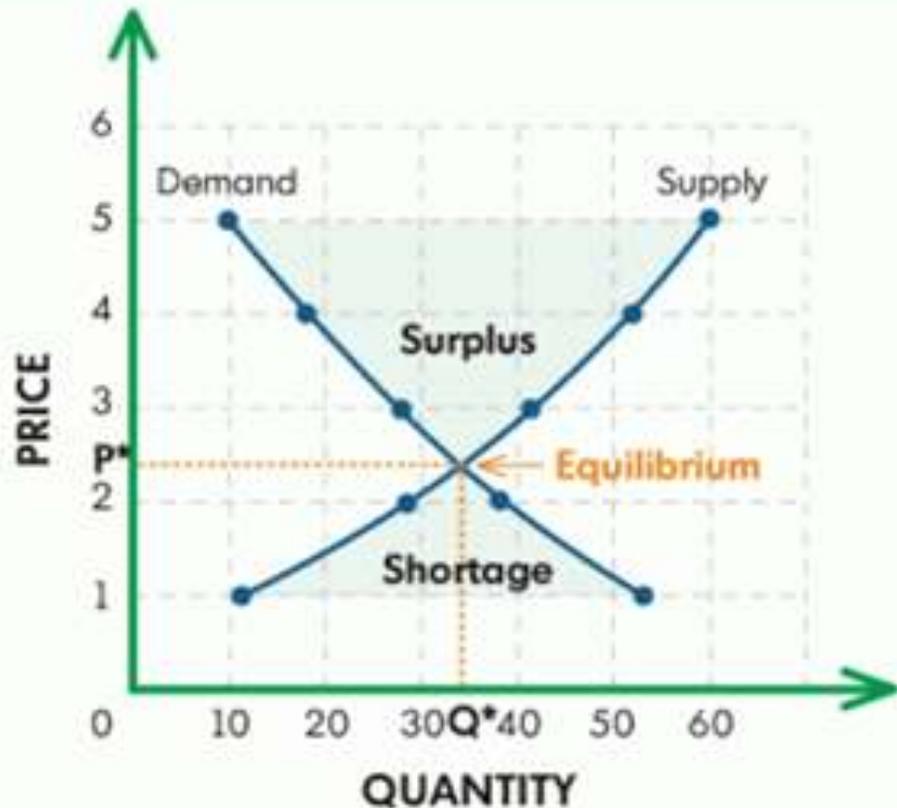
Faktor produksi dan keuntungannya terdiri dari pemodal (laba), tenaga kerja (upah) dan pemilik lahan (sewa)

Inefisiensi ekonomi disebabkan oleh kebijakan pemerintah yg menghambat keluar masuknya pelaku ekonomi seperti : bea cukai, pajak, batas harga maksimal dan minimal.

A. PENDEKATAN KLASIK / NEO KLASIK

Harga ditentukan oleh *demand and supply*:

Supply and Demand



1. Jika permintaan (demand) naik dan ketersediaan barang (supply) tidak berubah maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik.
2. Jika permintaan (demand) menurun dan ketersediaan barang (supply) tidak berubah maka penumpukan barang akan terjadi dan harga akan turun.
3. Jika permintaan (demand) tetap dan ketersediaan barang (supply) meningkat maka penumpukan barang akan terjadi dan harga akan turun.
4. Jika permintaan (demand) tetap dan ketersediaan barang (supply) turun maka kelangkaan barang akan terjadi dan harga akan naik.

PERBEDAAN PENDEKATAN KLASIK VS NEO KLASIK

1. Asumsi Pendekatan Klasik :

Pasar Dapat Meregulasi Diri Sendiri

- Doktrin ttg ketangguhan pasar dalam mengorganisasikan kegiatan transaksi ekonomi yg dipandu oleh sinyal harga dan perilaku mencari keuntungan.

Eksistensi Teori Nilai Dan Distribusi

- Harga suatu barang atau jasa dihitung berdasarkan jumlah jam kerja dan tenaga kerja yg dibutuhkan (semakin lama dan banyak jam atau tenaga kerja, semakin mahal). Maka selisih antara biaya produksi dan harga jual menjadi laba/kerugian pemodal. Sementara upah buruh dihitung sebagai biaya produksi.

Kritik terhadap ketimpangan pendapatan dalam pasar merupakan soal perjuangan kelas (*class struggle*) yg diperjuangkan melalui negara (instrumen politik)

PERBEDAAN PENDEKATAN KLASIK VS NEO KLASIK

1. Asumsi Pendekatan Klasik :

Peran Negara (*Non Ekonomi*)

Terutama dalam proses distribusi pendapatan, dimana terjadi benturan antar kelas (class struggle)

1. Melindungi masyarakat dari invasi dan kekerasan
2. Menjaga setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan
3. Menegakkan dan merawat pekerjaan-pekerjaan publik dan lembaga publik (infrastruktur, lembaga kesehatan, pendidikan, dsb)

2. Asumsi Pendekatan Neo Klasik

- Dampak terbesar dari liberalisme baru ini adalah semakin kuatnya praktek perdagangan bebas antar negara yang dilakukan oleh *Multinational Corporation* (MNC), dan semakin kuatnya lembaga keuangan swasta internasional mengatur ekonomi dunia.
- MNC menggelontorkan investasi ke berbagai negara dengan didukung oleh asumsi investasi akan meningkatkan kepemilikan modal bagi sebuah negara, namun investasi tersebut harus dilaksanakan oleh MNC itu sendiri, jikalau harus bekerjasama maka kerjasama dilakukan dengan lembaga ekonomi swasta yang ada di negara tujuan investasi.
- Negara-negara yang mengalami kekurangan modal memiliki kecenderungan mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan swasta internasional seperti Bank Dunia, IMF, maupun organisasi kreditur lainnya. Bahkan tak jarang beberapa negara memilih berhutang kepada MNC.

2. Asumsi Pendekatan Neo Klasik

- Inti dari pandangan ini adalah individu adalah agen yg memilih beberapa alternatif dari tindakannya dan dampak dari keputusannya/pilihannya
- Keputusan individu dihadapkan antara kondisi subjektif (keinginan) dan kondisi objektif (ketersediaan sumber daya), bila terdapat perbedaan maka muncul kelangkaan. Sehingga disebut sebagai pilihan terbatas – terpaksa (*constrained choice*)
- Pasar tidak memperhitungkan dominasi perusahaan besar dalam memanipulasi pasar
- Pendekatan ini menginginkan negara mengurus pengaruh eksternalitas yg disebabkan perusahaan yg tidak memasukkan laba ke dalam ongkos sosial, praktek monopoli/oligopoli, dan barang publik

2. Asumsi Pendekatan Neo Klasik

- Negara diharuskan membuat kebijakan yg memaksa perusahaan utk menginternalisasikan ongkos biaya sosial ke dalam laba
- Negara membuat kebijakan yg mengontrol perilaku pelaku ekonomi
- Negara mendesain kerangka hak kepemilikan dan sistem kontrak.
- Masalah eksternalitas diselesaikan melalui proses politik, sistem peradilan, dan regulasi pemerintah.

2. Pendekatan Neo Klasik

Menurut Robert Mills masalah eksternalitas dapat diselesaikan dengan cara :

- Pembagian otoritas dan tanggungjawab antara pemerintah pusat, lokal dan lembaga pemerintahan lainnya.
- Penegakkan pajak bagi penghasil polutan.
- Membatasi tingkat eksternalitas optimal.

2. Pendekatan Neo Klasik

Menurut Mansour Fakih (2011) menyebutkan pokok-pokok pendirian Neoliberal meliputi beberapa hal:

1. *Bebaskan perusahaan swasta* dari campur tangan pemerintah, misalnya jauhkan pemerintah dari campur tangan di bidang-bidang perburuhan, investasi, dan harga, serta biarkan mereka mempunyai ruang untuk mengatur diri sendiri untuk tumbuh.
2. *Hentikan subsidi negara* kepada rakyat karena hal itu selain bertentangan dengan prinsip Neoliberal tentang jauhkan campur tangan pemerintah, juga bertentangan dengan prinsip pasar dan persaingan bebas. Oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan privatisasi semua perusahaan milik negara, karena perusahaan negara pada dasarnya dibuat untuk melaksanakan subsidi negara pada rakyat, dan itupun menghambat persaingan bebas.
3. *Hapuskan ideologi 'kesejahteraan bersama' dan pemilikan komunal* seperti yang masih banyak dianut oleh masyarakat 'tradisional' karena dianggap menghambat atau menghalangi pertumbuhan.

2. PENDEKATAN KEYNESIAN

Kritik Maynard Keynes terhadap pendekatan Klasik/Neo Klasik:

1. Kegagalan pembelian akan terjadi karena akumulasi penawaran yg tinggi.
2. Pendekatan klasik menyebabkan penguasaan teknologi yg timpang, kemampuan kapital yg berbeda, dan penyebaran informasi yg timpang.
3. Sistem kapitalis mulai dari distribusi, investasi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan sistem harga akan menyebabkan akumulasi.

PENDEKATAN KEYNESIAN

Solusinya :

1. Negara harus memberikan insentif kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli, peningkatan capital, dan pemerataan teknologi.
2. Pemerintah menyediakan informasi yg lengkap untuk mendukung insentif.
3. Pemerintah harus melakukan pembangunan berkelanjutan, kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah, distribusi pendapatan memanipulasi permintaan agregat sehingga dapat mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja.

PENDEKATAN KEYNESIAN

Singkatnya :

Fungsi pemerintah diperlukan untuk mencegah resesi ekonomi akibat rendahnya agregat permintaan yg sistematis

Maka

Peran negara antara lain :

1. Memanipulasi permintaan agregat
2. Memperkuat sektor keuangan
3. Stabilisasi harga

Dengan memanfaatkan kebijakan fiskal pemerintah (pajak dan pendapatan negara).

3. PENDEKATAN MARXIAN

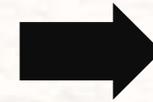
Asumsinya :

- ❖ Mulanya individu memiliki kepentingan ekonomi masing2, namun sebagai sebuah negara, individu dituntut untuk peduli kepentingan bersama. Sehingga disini terjadi pertemuan ekonomi dan politik, sehingga kegiatan ekonomi menjadi agenda politik.
- ❖ Sehingga tuntutan akan dominasi negara baru akan terwujud jika :

Kepentingan Individu



Kepentingan Bersama



Diorganisasikan Secara Kolektif

PENDEKATAN MARXIAN

Asumsinya :

- ❖ Pendekatan ini melihat sistem klasik lebih mengembangkan inovasi produksi dibandingkan pengembangan pranata faktor-faktor produksi. Sehingga pemegang polis terbesar atau profit adalah pemilik modal yg relatif, sementara upah tenaga kerja dan sewa adalah biaya tetap (*fixed cost*)
- ❖ Marxian menghendaki faktor produksi dikuasai negara
- ❖ Produksi dan investasi dilakukan berdasarkan perencanaan terpusat yg mencakup tingkat pertumbuhan ekonomi dan perangkat penunjangnya
- ❖ Implementasi rencana ekonomi terpusat mempertimbangkan kebutuhan warga negara berdasarkan sumber daya yg dimiliki dan berbasis tindakan kolektif daripada privatisasi

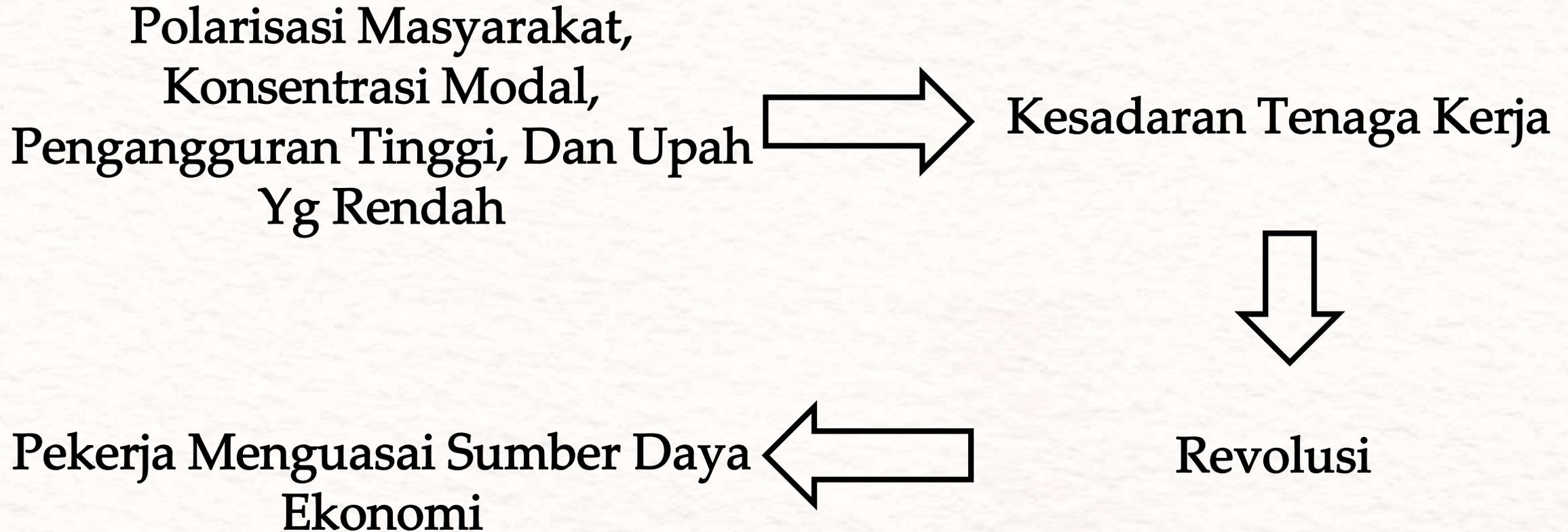
PENDEKATAN MARXIAN

Prinsip utamanya :

1. Negara menyiapkan seluruh regulasi utk menggerakkan kegiatan ekonomi (sistem kepemilikan, proses transaksi, dan pembagian keuntungan) mulai dari perencanaan – operasionalisasi – pengawasan – evaluasi.
2. Pelaku ekonomi tidak membuat kontrak dengan pelaku ekonomi lain, melainkan dengan negara. Utk menghindari dari ketimpangan pendapatan.

PENDEKATAN MARXIAN

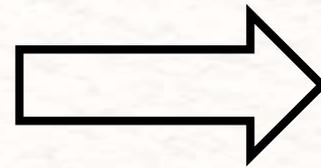
Pendekatan ini akan terwujud dengan 2 pola : Pertama POLA POLITIK



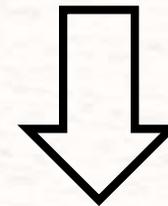
PENDEKATAN MARXIAN

Kedua Pola Ekonomi Politik

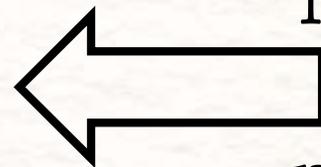
Pekerja masuk ke dalam kelompok kepentingan (Ormas, Parpol)



Menguasai institusi politik



Penguasaan pemilik modal dapat diimbangi



Membuat kebijakan pro pekerja (upah, keamanan kerja, uang pensiun, dan pengawasan kerja)

TEORI EKONOMI POLITIK

Teori ekonomi politik lahir karena teori ekonomi konvensional tidak mampu memecahkan masalah yang mengemuka dalam kegiatan ekonomi.

Seperti masalah jumlah penduduk, tingginya pengangguran, ketersediaan sumber daya, rendahnya kualitas hidup, dan langkanya modal

TEORI EKONOMI POLITIK

1. Teori Pilihan Publik
2. Teori *Rent Seeking*
3. Teori *Redistributive Combines*
4. Teori Keadilan

TEORI PILIHAN PUBLIK

- ❖ Disebut juga sebagai teori pilihan rasional → titikberatnya pada manfaat yang didapat (untung/rugi) dari keyakinan, preferensi, pilihan, tindakan, pola perilaku individu maupun kelompok
- ❖ Aplikasi metode ekonomi terhadap politik
- ❖ Teori ini menganggap para aktor politik memiliki kepentingan sendiri dalam ekonomi, yg disebut sebagai pilihan rasional
- ❖ Masyarakat diposisikan sebagai konsumen, sedangkan aktor politik sebagai penyedia kebijakan publik → **formulasi kebijakan dan dukungan dalam pasar politik → kebijakan publik adalah hasil interaksi politik diantara pelaku rasional yg ingin memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri.**
- ❖ Selain itu juga membahas praktek pertukaran politik, kekuasaan dan hubungan otoritas

TEORI PILIHAN PUBLIK

Alasan kelahiran teori ini :

1. Kecukupan kepentingan material individu memotivasi adanya perilaku ekonomi para aktor politik
2. Kecukupan ekonomi memotivasi perilaku politik tertentu
3. Motif kecukupan ini lebih mirip dengan praktek ekopol neoklasik
4. Individu dalam masyarakat dan para aktor politik aktif, berupaya memperbesar kekuasaannya – pengaruh, sama seperti pengusaha yg ingin memperbesar keuntungan

*Politik dianggap sebagai panggung untuk mengeruk sumber daya publik sehingga fokusnya ada pada **kekuasaan***

TEORI PILIHAN PUBLIK

Pada level analisis teori ini dibagi 2 :

Teori Pilihan Publik Normatif

- Teori ini membahas perangkat kerja konstitusi dalam sistem politik sebuah negara

Teori Pilihan Publik Positif

- Teori ini fokus pada pembahasan perilaku aktor politik dalam sistem politik

TEORI PILIHAN PUBLIK

Pada level operasionalisasi teori ini dibagi 2 :

Demand

- Aktor politik dibagi menjadi pemilih dan kelompok penekan.
- Pemilih mengontrol suara pada pemilu agar mendapatkan kebijakan yg diinginkan
- Kelompok penekan (terorganisir) mampu menekan otoritas utk mewujudkan keinginan mereka

Supply

- Fokus formulasi kebijakan → pusat kekuasaan yg dipilih (eksekutif dan legislatif) dan pusat kekuasaan yg tidak dipilih (cabang eksekutif dan lembaga independen)
- Pusat kekuasaan yg dipilih merespon *demand* pemilih dan kelompok penekan
- Pusat kekuasaan yg tidak dipilih merespon *demand* kelompok kepentingan

PERBANDINGAN PARADIGMA KLASIK DAN PILIHAN PUBLIK

VARIABEL	EKONOMI KLASIK	PILIHAN PUBLIK
Pemasok (<i>Supplier</i>)	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Parpol, Birokrasi, Pemerintah
Peminta (<i>Demander</i>)	Konsumen	Pemilih (<i>Voters</i>)
Jenis Komoditas	Komoditas Individu	Komoditas Publik
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Transaksi Sukarela	Kepentingan Politik Sebagai Pertukaran

TEORI PILIHAN PUBLIK

Kritik terhadap teori ini :

Teori ini dianggap tidak berhasil pada sisi *supply*

- 1. Ketidakmungkinan yg melekat / otomatis** : merujuk pada kondisi dimana negara//pemerintah tidak melakukan segala hal secara sederhana
- 2. Kegagalan politik** : rintangan politik akibat persaingan kepentingan sehingga sulit diwujudkannya kebijakan yg diminta
- 3. Kegagalan birokrasi** : aparat dan organ birokrasi tidak sanggup mewujudkan tuntutan administratif sesuai dengan tujuan/niat semula

Bisa ditambah dengan kegagalan legislatif, yudikatif dan kegagalan penegakkan (enforcement failure)

TEORI *RENT SEEKING* menurut Krueger

Asumsinya :

- ❖ *Rent Seeking* = upaya individual/kelompok utk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah (proses pembuatan hingga implementasi)

Para aktor politik berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar2nya dengan upaya sekecil2nya

- ❖ Salah satu bentuknya adalah dalam melakukan **lobi**, jika dicontohkan tujuannya adalah menghasilkan kebijakan, maka akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi maupun aspek lainnya, karena proses pengambilan keputusan yg berlarut2.
- ❖ Singkatnya, semakin besar upaya pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, semakin besar kesempatan bagi para *rent seeking*

TEORI *RENT SEEKING*

Contohnya :

Keterkaitan antara para pengusaha dengan politisi, menurut anda apa keuntungan yg didapat diantara keduanya?

Praktek ini berdampak pada **distorsi alokasi sumber daya, ekonomi menjadi tidak efisien, KKN.**

- ❖ Masyarakat akan mengalokasikan segala sumber daya utk mendapatkan peluang dari pemerintah
- ❖ Setiap aktor politik akan berupaya utk mempertahankan posisi yg menguntungkan, sehingga stabilitas politik tidak akan terwujud
- ❖ Kepentingan pemerintah tidak tunggal, karena ada persaingan kepentingan aktor politik

Bagaimana caranya menghilangkan *Rent Seeking*?

1. Penguatan ideologi
2. Penciptaan pasar persaingan sempurna tanpa keterlibatan pemerintah sehingga tidak ada peran politik dalam ekonomi yg menguntungkan aktor2 politik

TEORI *REDISTRIBUTIVE COMBINES*

- ❖ *Redistributive combines* = kelompok yg terbentuk dgn tujuan memperoleh pendapatan cuma2 yg dibagikan oleh negara atau disalurkan melalui sistem hukum atau sekedar utk melindungi diri sendiri
- ❖ Pola *Redistributive combines* berupa perlakuan istimewa, pengampunan pajak, menurunkan harga, memberikan perlindungan bagi pekerja tertentu, memberikan hak khusus pada bidang usaha tertentu.
- ❖ Maka tujuan kelompok kepentingan dalam Ekopol akan berusaha utk mempengaruhi pemerintah utk memperoleh redistribusi yg menguntungkan mereka atau anggotanya. Dengan dilegitimasi oleh adanya aturan hukum dsb.
- ❖ Sehingga sistem ekonomi mengabdikan pada sistem politik dengan pola *Redistributive combines*. Sistem hukum dibiarkan kabur.

TEORI *REDISTRIBUTIVE COMBINES*

- ❖ Teori ini sesuai dengan Teori Regulasi Ekonomi (Stigler) yg khusus membahas SIAPA YG MENDAPATKAN MANFAAT, dan SIAPA YG MENANGGUNG BEBAN akibat adanya suatu regulasi atau aturan ekonomi.

ALURNYA

Membentuk organisasi utk memperoleh pendapatan cuma2



Partai politik, media massa, organisasi informal, perusahaan, bahkan keluarga2.



Proses mendapatkann ya melalui sistem hukum



Organisasi ini akan bertarung jangan sampai peraturan baru mengancam keuntungan yg mereka dapat, kalau bisa menghasilkan baru

TEORI *REDISTRIBUTIVE COMBINES*

Penyebabnya :

- ❖ Sistem politik yg tertutup
- ❖ Sistem hukum yg kabur
- ❖ Ketidadaan *rule of law* dalam ekonomi
- ❖ *Pemerintah tidak bebas dari kepentingan individu atau tidak netral* sehingga tujuan yg ingin mengalokasikan kebijakan kepada kelompok ekonomi yg tepat yg berkepentingan terhadap kebijakan tersebut, pada akhirnya hanya memberikan *privilege* bagi kelompok tertentu.
- ❖ Struktur produksi berdampak pada kekuatan ekonomi sehingga tercipta ketidakmerataan yg berdampak pada pengaruh yg diberikan terhadap sistem politik.

TEORI KEADILAN menurut RAWLS

Didasarkan pada prinsip :

- ❖ Setiap orang memiliki hak yg sama terhadap skema kebebasan yg sejajar
- ❖ Ketimpangan sosial dan ekonomi harus ditangani
 - Diekspektasikan secara logis menguntungkan setiap orang
 - Dicantumkan setiap posisi dan jabatan yg terbuka bagi semua orang

Maka penciptaan prinsip politik yg berbasis Kontrak atau Kesetaraan adalah keharusan

Justice = Fairness

Pasar bebas adil secara prosedural (*Procedural justice*) namun tidak adil secara sosial (*Social justice*) karena menyebabkan ketimpangan akibat perbedaan struktur produksi dan kemampuan.

Uraian Tugas

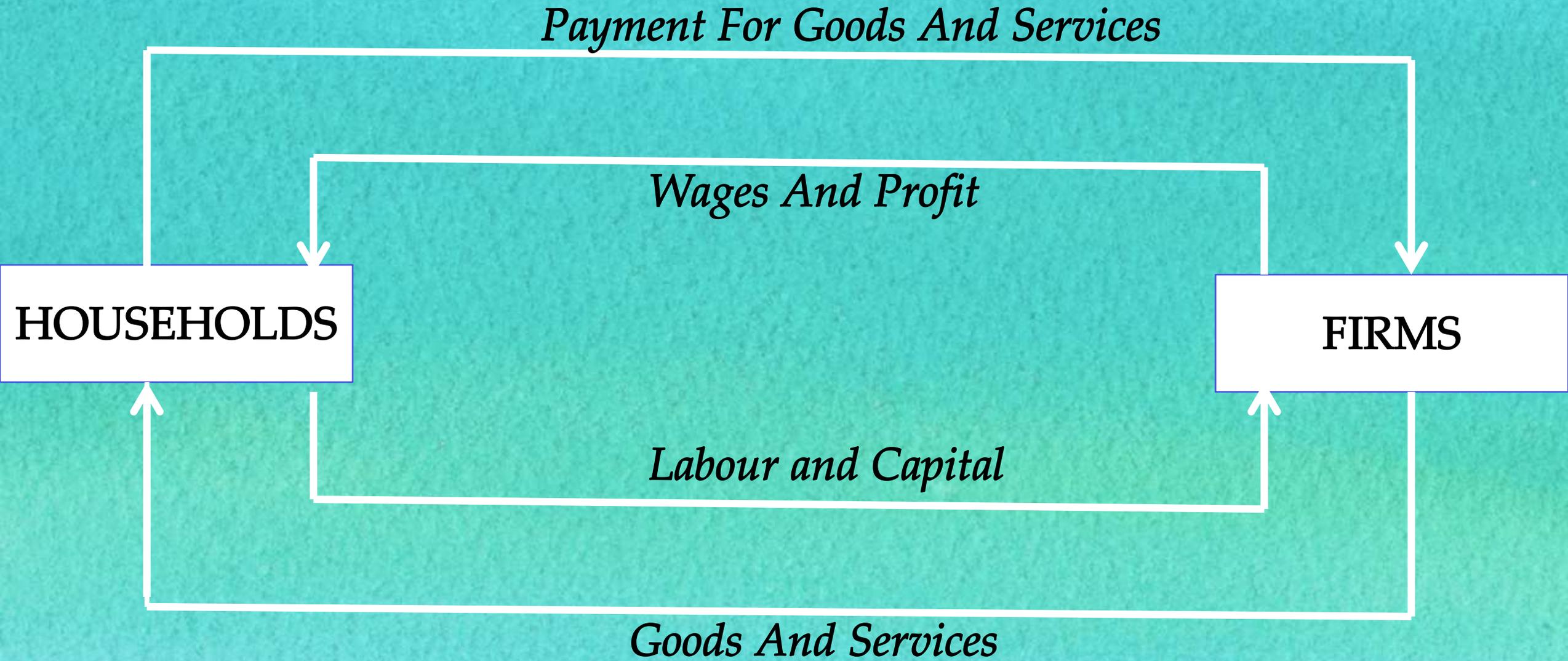
1. Jelaskan teori rent seeking, pilihan publik, dan redistributive combines
2. Jelaskan contoh kasus
3. Lalu analisis contoh kasus tersebut menggunakan teori

TEORI PILIHAN PUBLIK

- 1. Jelaskan dulu teori pilihan publik**
- 2. Jelaskan contoh kasus**
- 3. Analisis contoh kasus tersebut menggunakan teori pilhan publik**

RENT SEEKING

CARA KERJA EKONOMI : Kapitalisme dan Sosialisme



Cara Kerja Ekonomi Sederhana

KEKURANGAN DARI CARA KERJA EKONOMI DIATAS

1. Bahwa seseorang memiliki modal dan yg lainnya memiliki *labour* adalah sesuatu yg alamiah terjadi
2. Kondisi itu melahirkan “**relasi kuasa**” yg berdampak pada perbedaan akses terhadap sarana produksi, distribusi, pertukaran dan komunikasi dalam masyarakat. Sehingga melahirkan alienasi dan eksploitasi manusia
3. *Labour* yg sebenarnya adalah sebuah aktifitas manusia, dimaknai sebagai benda.
4. Kondisi ini mengakibatkan semua peristiwa sosial, psikologis, dan fisik sebagai eksternalitas (di luar urusan ekonomi)

STRATEGY OF COST REDUCTION in CAPITALISM

Ada 2 cara :

- ❖ **Alih Teknologi** : penambahan teknologi untuk menekan produktifitas labour, dampaknya adalah pengangguran. Maka kualitas labour juga harus ditingkatkan untuk menciptakan relasi kekuasaan dari labour dalam mengontrol upah
- ❖ **Cost Shifting** : meningkatkan intensitas jam kerja, atau memperpanjang jam proses produksi
- ❖ **Mereduksi standar lingkungan** : menekan atau mencari lingkungan produksi dengan standar rendah

Cara Kerja Ekonomi Ideal

- ❖ Kapital disediakan perusahaan yang disesuaikan dengan Labour dan input komoditas (bahan mentah) diperhitungkan sebagai bagian dari cara kerja produksi. Hubungannya adalah saling membutuhkan, dan konflik kepentingannya setara
- ❖ Barang jadi dijual dengan dikenai pajak akibat terhadap kondisi eksternalitas, begitupula keuntungan perusahaan dipotong dengan dampak eksternalitas
- ❖ Kondisi eksternalitas harus direproduksi ulang kembali menjadi kondisi semula

FOKUS EKOPOL DALAM SISTEM EKONOMI IDEAL

- ❖ **Proses produksi** : membahas tujuan, fungsi, relasi kekuasaan dari aktifitas sosial manusia di dalam kerja proses produksi yg merupakan interaksi antara labour dan capital. Konflik kepentingan labour dan firms.
- ❖ **Pasar** : tempat interaksi pilihan individu mengakses produk, kondisi eksternalitas, permintaan dan penawaran, daya beli. Yg terpenting juga adalah konflik kepentingan antara penjual dan pembeli
- ❖ **Input produksi** : kapital, labour power, dan relasi kekuasaan keduanya
- ❖ **Output produksi** : harga, eksternalitas, kesejahteraan,

CAPITALIST MODE OF PRODUCTION

Manusia adalah makhluk sosial yg memiliki hubungan resiprokal dan interelasi baik tercipta dalam bentuk yg bebas maupun hirarkis dengan kecenderungan dominasi

Capitalist mode of production = capitalist – isme

Economic and social system characterised by the profit motive and the control of the means of productions, distribution, and exchange of goods by private ownership

Kata kunci :

- ✓ Profit motive bukan utk memenuhi kebutuhan tetapi keuntungan pribadi
- ✓ Kontrol terhadap produksi, distribusi, dan pertukaran oleh kepemilikan pribadi

PROFIT MOTIVE

- ❖ Pemilik kapital akan membayar nilai tertentu terhadap sebuah komoditas, dan menggandakannya dengan menjual komoditas dengan selisih harga tertentu
- ❖ Kehidupan manusia adalah bekerja bertujuan untuk menghasilkan keuntungan
- ❖ Contohnya : keramahan yg adalah ciri sosial biasa diubah dalam masyarakat kapitalis untuk mendapatkan keuntungan dalam industri pariwisata
 - ❖ Manusia menawarkan segala hal untuk mendapatkan keuntungannya, termasuk tenaga

PRIVATE OWNERSHIP

Max Weber : Spirit kapitalisme memiliki karakter sebuah situasi ketika orang-orang dipengaruhi oleh gagasan untuk mencari uang dan pengadaan barang. Hidup diorientasikan untuk keberhasilan.

John Locke Dan Milik Pribadi

- ❖ Menurut Locke kepemilikan pribadi itu berdasarkan pekerjaannya
- ❖ Setiap manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri, kepribadian, tubuh dan tenaga yg dihasilkan dari tubuh tsb, pekerjaan merupakan legitimasi dari seseorang
- ❖ Manusia menginvestasikan tenaga nya pada orang yang memberi pekerjaan, namun pemberi pekerjaan tidak boleh menghabiskan investasi tersebut
- ❖ Uang dapat mengakumulasikan kepemilikan seseorang

KEBAIKAN KAPITALISME

Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

KELEMAHAN KAPITALISME

Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik.

Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain).

KAPITALISME DAN DEMOKRATISASI

1. Pemerintahan demokratis dapat mengoreksi akses kapitalis sehingga terjadi pemerataan
2. Konflik kepentingan antar kelas dalam relasi kekuasaan ekonomi dapat teratasi
3. Pemerataan kepemilikan faktor produksi

EKONOMI POLITIK SOSIALISME

SISTEM EKONOMI POLITIK SOSIALIS

Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu fiksi belaka.

Sehingga tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi

Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan , pelaksanaan hingga tahap pengawasan.

Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.

Pola produksi (aset dikuasai masyarakat) melahirkan kesadaran kolektivisme (masyarakat sosialis)

KEBAIKAN EKOPOL SOSIALISME

1. Kebutuhan pokok manusia disediakan negara
2. Orang gagal dalam kompetisi ekonomi diurus negara
3. Perencanaan ekonomi dan produksi dikontrol dan dilaksanakan oleh negara sesuai dengan kebutuhan warga negara
4. Masalah surplus produksi yg menguntungkan kapitalis tidak akan terjadi, karena surplus produksi di distribusikan bagi kepentingan negara

KELEMAHAN EKOPOL SOSIALISME

1. Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum
2. Tidak ada kebebasan memilih pekerjaan (Maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, produksi dan perekonomian akan stagnan).
3. Tidak ada insentive untuk kerja keras (Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik, prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur).
4. Tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi (Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme).

Sosialisme tidak sama dengan komunisme

- Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme.
- Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat (*The Six Major Historical Stages*): *primitive communism slavery feudalism, capitalism, socialism dan full communism*
- Komunisme → masyarakat tanpa kelas → tanpa otoritas berkuasa

**PEMBANGUNAN KOMPARATIF :
PERBEDAAN DAN PERSAMAAN
DIANTARA NEGARA-NEGARA
BERKEMBANG**

TOLAK UKUR SEBUAH NEGARA BERKEMBANG

- 1. Pendapatan Per Kapita (Bank Dunia) :** pendapatan sebuah negara diklasifikasi berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita **rendah (\$765), menengah-bawah(\$766), menengah-atas(\$3.035), dan tinggi(\$9386+)**
- 2. Tingkat Hutang Internasional (Bank Dunia) :** kategorinya **sangat berhutang, berhutang menengah, dan berhutang sedikit**
- 3. Tingkat Pembangunan Manusia (UNDP):** termasuk tingkat pendidikan dan kesehatan (0 – 1)
4. Keamanan belum terjamin
5. Fasilitas kesehatan minim
6. Perkembangan penduduk tidak terkendali
7. Tingginya pengangguran
8. Impor lebih besar

Tujuan mereka sama, yaitu

1. Memerangi Kemiskinan
2. Mengatasi Ketidakmerataan Pendapatan
3. Mengurangi Tingkat Pengangguran
4. Memenuhi Standar Minimum Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, Dan Kecukupan Pangan
5. Memperluas Kesempatan Di Bidang Sosial Ekonomi
6. Pengintegrasian Nasional

Terdapat **160 negara** yg dikategorikan sebagai negara **Dunia Ketiga**

Faktor tolak ukur Perbedaan **antara negara berkembang berpenghasilan tinggi dengan negara berkembang paling miskin sangat besar**, daripada antara negara kaya dengan negara berkembang

Letak perbedaannya :

Kebudayaan, Kondisi ekonomi, Struktur sosial dan politik, Luas wilayah dan jumlah penduduk, Integrasi nasional, SDA, Potensi swasembada

Persamaannya → kondisi keuangan

**Tantangan
yang
berbeda
dengan
kadar yang
berbeda ada
pada**

1. Kemiskinan absolut yg kronis dan meluas
2. Cenderung meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur
3. Jurang kesenjangan distribusi pendapatan yg semakin melebar
4. Ancaman stagnasi dan rendahnya tingkat produktivitas di bidang pertanian
5. Meningkatnya ketidakseimbangan taraf hidup dan ketidakseimbangan antara perkotaan dan pedesaan
6. Kerusakan lingkungan hidup
7. Kurang memadainya fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan
8. Membengkaknya utang luar negeri dan memburuknya neraca pembayaran
9. Ketergantungan pada teknologi luar negeri
10. Semakin lemahnya struktur kelembagaan dan sistem tata nilai akibat pengaruh budaya luar

8 KARAKTER PERBEDAAN KERAGAMAN NEGARA2 BERKEMBANG

- 1. Ukuran Negara** → luas geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan :
 - ❖ Dari 160 negara berkembang : 87 negara dengan jumlah penduduk 5 juta jiwa keatas, 58 negara kurang dari 2,5 juta jiwa, dan 38 negara kurang dari 500ribu jiwa
 - ❖ Manfaat wilayah yg luas : tersedianya sumber daya, potensi pasar yg luas, memiliki bahan baku mandiri.
 - ❖ Negara dgn wilayah yg luas dan penduduk yg banyak : beratnya tugas pengawasan administratif, pembinaan kesatuan nasional, penanggulangan ketidakseimbangan regional
- 2. Latar Belakang Sejarah Dan Kolonial** : kolonialisme Eropa meninggalkan praktek kepemilikan pribadi, pajak perseorangan, dan pajak yg harus dibayar dengan uang bukan barang, sehingga merusak sendi ekonomi lokal dan masyarakat yg rapuh.

8 KARAKTER PERBEDAAN KERAGAMAN NEGARA2 BERKEMBANG

3. Persediaan Sumber Daya Fisik → Alam Dan Manusia :

- ❖ SDA : tanah yg subur, kandungan mineral berharga, dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya
- ❖ Letak geografis dan iklim
- ❖ SDM : jumlah penduduk, ketrampilannya atau tingkat pendidikannya
- ❖ Pandangan hidup manusia, tingkat kebudayaan, sikap2 atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, akses utk mendapatkan informasi, dan besar kecilnya keinginan utk memperbaiki hidup secara kreatif dan otonom, serta kecakapan administratif

4. Komposisi Etnik Dan Agama

- ❖ Semakin besar keragaman etnis dan agama semakin besar pula gejolak internal dan instabilitas politik.

8 KARAKTER PERBEDAAN KERAGAMAN NEGARA2 BERKEMBANG

5. Arti Penting Relatif Atas Sektor Pemerintah Dan Swasta Serta Masyarakat Sipil :

- ❖ Mayoritas menganut sistem ekonomi campuran (ada peran swasta dan pemerintah dalam ekonomi). Namun ada yg peran swasta lebih besar, dan sebaliknya. Ditambah pengaruh asing dalam swasta, maupun pemerintah
- ❖ Di negara yg di dominasi swasta, penciptaan lapangan pekerjaan lebih besar. Negara yg didominasi pemerintah, berfokus pada pembangunan pedesaan/regional.
- ❖ Civil Society - NGO's menjadi fokus dalam melakukan inovasi sosial

6. Sifat Dasar Struktur Industri

- ❖ Industri primer : pertanian, perikanan dan kehutanan
- ❖ Industri sekunder : perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa

8 KARAKTER PERBEDAAN KERAGAMAN NEGARA2 BERKEMBANG

7. Kadar Ketergantungan Eksternal

- ❖ Tingkat ketergantungan suatu negara berkembang ditentukan oleh luas wilayah, SDA, dan sejarah perjalanan politik
- ❖ Negara berkembang yg kecil bergantung pada investasi asing, hubungan perdagangan dengan luar negeri, pasokan teknologi produksi dari negara maju
- ❖ Pengaruh struktur politik, nilai2, pola konsumsi, sikap terhadap pekerjaan, sikap terhadap diri sendiri, serta sikap terhadap kehidupan

8. Struktur Politik, Kekuasaan, Dan Kelompok Kepentingan

- ❖ Proses ekonomi dan pembangunan ditentukan oleh struktur politik, aneka kepentingan yg sepihak dan tersembunyi, persengkokolan elit (tuan tanah, kaum industrialis perkotaan, bankir, pengusaha asing, perwira militer, dan pengurus serikat buruh).

KARAKTERISTIK NEGARA BERKEMBANG

- 1. Standar kehidupan yg relatif rendah** ditunjukkan oleh tingkat pendapatan yg rendah, ketimpangan pendapatan yg parah, kondisi kesehatan yg buruk (usia kematian, sanitasi, malnutrisi, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan), rendahnya kualitas pendidikan dan kurang memadainya sistem pendidikan
- 2. Tingkat produktivitas yg rendah** (Tenaga kerja, fungsi produksi) disebabkan oleh masalah pemanfaatan tanah, pengelolaan pajak badan usaha, struktur perbankan, masalah lembaga administrasi yg tidak menganut nilai *good governance*, sikap kaum pekerja dan pihak manajemen.
- 3. Tingkat pertumbuhan penduduk** serta beban ketergantungan yg tinggi (kematian dan kelahiran yg tinggi), jumlah anak2 yg tinggi menjadi beban
- 4. Ketergantungan pendapatan** yg sangat besar kepada **sektor pertanian** serta ekspor-ekspor produk primer (bahan mentah)
- 5. Pengaruh perpindahan nilai, sikap, kelembagaan dan standar perilaku** yg tidak sesuai dengan masyarakat negara berkembang

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Program tahunan UNDP, yg mengukur :

- ❖ **Masa hidup** – harapan hidup
- ❖ **Pengetahuan** – kemampuan baca tulis orang dewasa
- ❖ **Standar kehidupan** – pendapatan per kapita, dan daya beli

Dengan ukuran : 0 = RENDAH

1 = TINGGI

0.0 – 0,499 → Tingkat Pembangunan Manusia **Rendah**

0,50 – 0,799 → Tingkat Pembangunan Manusia **Menengah**

0,80 – 1,0 → Tingkat Pembangunan Manusia **Tinggi**

SOLUSI BAGI NEGARA BERKEMBANG

- ❖ Rangsangan perdagangan internasional
- ❖ Penelitian dan pengembangan untuk menyelesaikan masalah nasional
- ❖ Stabilitas dan fleksibilitas lembaga politik dan sosial
- ❖ Keefektifan institusi ekonomi domestik → insentif utk merangsang pertumbuhan dan akses utk kesempatan berusaha bagi masyarakat luas
- ❖ Transfer teknologi dari negara maju
- ❖ Akumulasi modal melalui investasi

Beberapa kesimpulan...

- ❖ Fenomena keterbelakangan negara berkembang harus dilihat dalam konteks nasional dan internasional
- ❖ Penelahaan pada kebijakan ekonomi dan politik baik dalam negeri maupun luar negeri
- ❖ Telaah tingkat perubahan kelembagaa, teknologi, dan sosial

KONDISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

- 1. Pendapatan Per Kapita (Bank Dunia) :** pendapatan sebuah negara diklasifikasi berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita **rendah (\$765), menengah-bawah(\$766), menengah-atas(\$3.035), dan tinggi(\$9386+)** → *(PDB Per Kapita Indonesia sebesar 3917.087 USD pada 2020)*
- 2. Tingkat Hutang Internasional (Bank Dunia) :** kategorinya **sangat berhutang, berhutang menengah, dan berhutang sedikit** → *ULN Rp 8ribu Triliun-Sangat Berhutang)*
- 3. Tingkat Pembangunan Manusia (UNDP):** termasuk tingkat pendidikan dan kesehatan (0 – 1) → *Pada 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92 atau masuk dalam kategori tinggi*
- 4. Keamanan belum terjamin** → *Indonesia negara ke 76 teraman di Indonesia dari 195 negara*
- 5. Fasilitas kesehatan minim** → *poin indeks kesehatan Indonesia adalah 56,6 (dari 100) ; peringkat 30 di Dunia)*
- 6. Perkembangan penduduk tidak terkendali** → *Tahun 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 32,57 juta jiwa dari total penduduk Indonesia pada tahun 2010 yang baru sebanyak 237,63 juta jiwa.*
- 7. Tingginya pengangguran** → *2020: Angkatan kerja 138,22 juta orang, yang bekerja 128,45 juta orang, pekerja informal 7,68 juta orang.*
- 8. Impor lebih besar** → *nilai ekspor Indonesia Januari–Agustus 2020 mencapai US\$103,16 miliar, Impor sebesar US\$ 141,57 miliar.*

TUGAS

**BENTUK 4
KELOMPOK
, CARI
PENYEBAB
NYA APA,
LALU
PERBANDI
NGKAN
DENGAN
NEGARA
LAIN**

EKOPOL GLOBALISASI

Perdebatan awal kelahiran ekopol globalisasi :

1. Pendekatan klasik sulit diterapkan karena tidak mendapatkan legitimasi sistem politik
2. Sementara sistem politik diragukan jika tidak dapat menghadirkan kesejahteraan sosial

**Maka lahirlah globalisasi, dengan asumsi :
Terciptanya pemerataan ekonomi antar negara yang tidak terbatas pada ruang (batas negara maupun sistem politik)**

Namun, lahir pula pertanyaan :

1. *Apa benar pemerataan ekonomi terwujud?*
2. *Bagaimana fakta perkembangan ekopol globalisasi saat ini?*

Defenisi Globalisasi

- ❖ Globalisasi adalah istilah yg digunakan utk menjelaskan pengurangan atau peniadaan sekat-sekat bagi kelancaran arus barang, uang dan SDM.
- ❖ Globalisasi adalah pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi secara cepat dan mendalam.

Menurut Spillane, globalisasi digerakkan oleh 2 faktor :

1. Pergeseran pembangunan yg dipimpin pemerintah (*government led*) ke pembangunan yg dipimpin oleh pasar (*market led*).
2. Kemajuan teknologi yg memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global

Pergeseran paradigma pembangunan dari *government led* menjadi *market led* menyebabkan :

- ❖ Pergeseran kekuasaan dari negara ke perusahaan multinasional
- ❖ Dominasi sistem ekonomi terhadap sistem politik
- ❖ Kebijakan di bidang ekonomi yg bersifat antar negara diambil alih oleh negara maju dan institusi internasional yg didominasi

Sehingga lahir 2 hipotesis :

1. “Hipotesis Dramatis” oleh Kenichi Ohmae → globalisasi akan melenyapkan *nation state*
2. Hipotesis “*Silent take-over and death of Democracy*” oleh Noreena Hertz → globalisasi ekonomi akan mematikan demokrasi

Globalisasi → Polarisasi Aktivitas Ekonomi Global

1. Kelompok perdagangan yg dibentuk atas dasar kedekatan wilayah (integrasi regional)
2. Kelompok perdagangan yg dibentuk berdasarkan skala ekonomi tertentu

Secara umum ada 2 agenda rencana perdagangan internasional :

1. Membebaskan atau meminimalisir bea masuk perdagangan antar negara peserta kelompok perdagangan
2. Liberalisasi sektor keuangan → integrasi sistem keuangan negara dengan keuangan global (pada negara maju utk memapankan sistem ekonomi, sementara pada negara berkembang agar tidak teralienasi perekonomian internal dengan negara lain)

**Fakta bahwa Globalisasi
didasarkan pada
pendekatan Klasik/Neo**

Klasik

**Menyebabkan peran dari
pihak swasta sangat besar**

**Dalam konteks ini disebut
*Multinational Corporations***

→ *MNCs*

Mayoritas MNCs berada di negara-negara maju, sehingga peningkatan pendapatan MNCs berdampak pada pertumbuhan negara maju

Sementara negara berkembang dan negara miskin hanya menjadi pasar

Namun kelahiran MNCs didorong oleh kebijakan sebuah negara, sehingga semua negara hakikatnya mampu melahirkan MNCs

Perdebatan Keberadaan MNCs

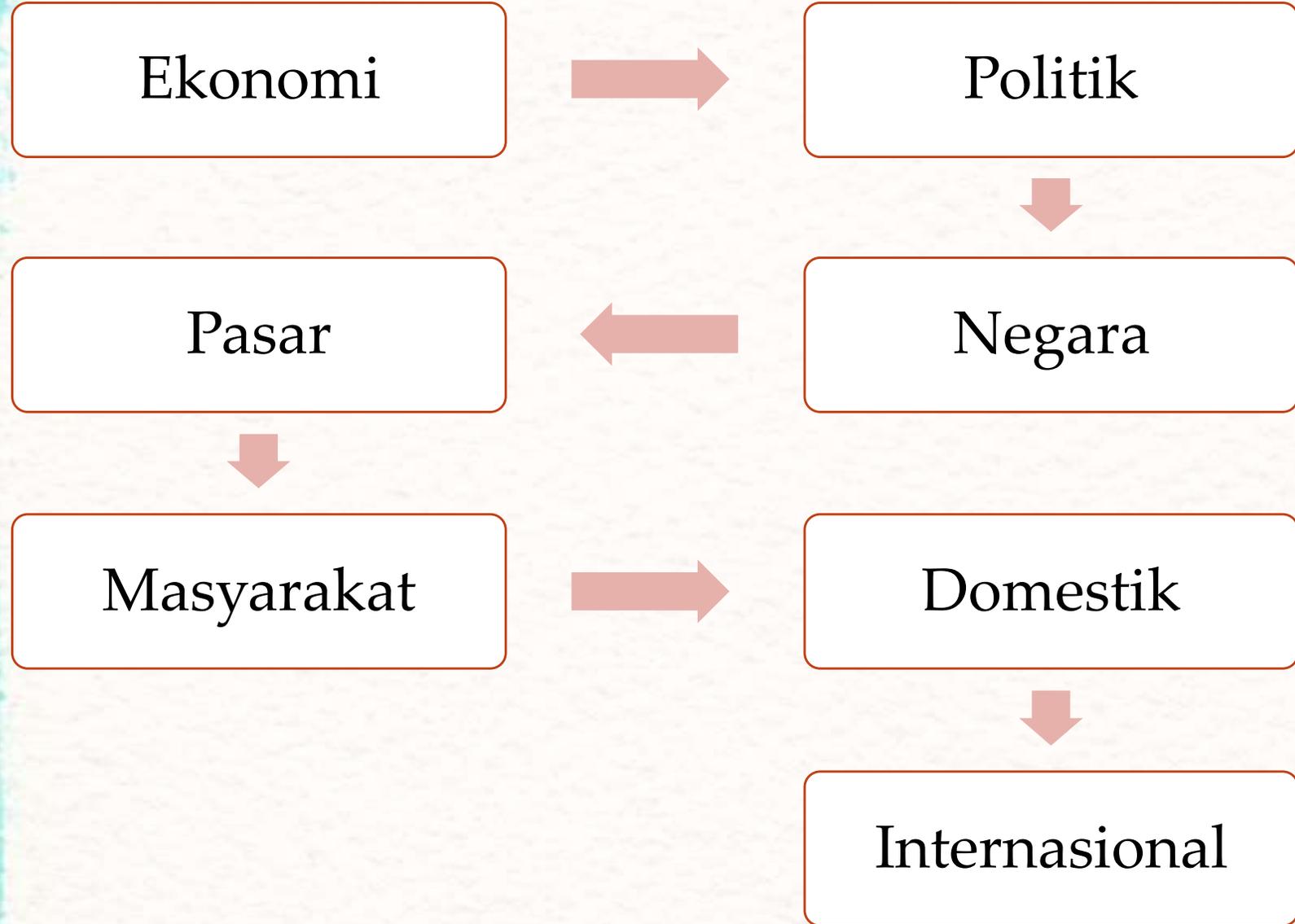
Pro MNCs

1. Non Marxist : MNCs menciptakan pasar persaingan sempurna pada taraf global, terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan penerimaan pajak.
2. Marxist : negara dunia ketiga mendapatkan manfaat dari keberadaan MNCs yg berinvestasi pada segmen ekonomi yg belum ada.

Kontra MNCs

1. Non Marxist : MNCs menciptakan pasar oligopoli yg bisa mengakusisi MNCs lain
2. Marxist : MNCs mengeksploitasi negara berkembang dan miskin

Maka fokus pembahasan dalam Ekopol Globalisasi



4 Perspektif Ekopol Globalisasi/Ekopol Internasional

1. MERKANTILIS

- ❖ **Aktor** : negara bangsa
- ❖ **Tujuan** : maksimalisasi kepentingan nasional
- ❖ **Sifat hubungan dan sistem** : konfliktual dan menguntungkan si kuat
- ❖ **Peran negara** : primer
- ❖ **Hubungan ekopol** : politik menentukan ekonomi
- ❖ **Kemungkinan perubahan** : perubahan ekonomi dan politik ditentukan oleh perubahan distribusi kekuasaan
- ❖ **Preskripsi** : negara lemah maka harus ada intervensi pasar utk melindungi ekonomi domestik dari dominasi asing
- ❖ **Strateginya** : pengendalian harga dan upah sehingga barang yg dihasilkan dijual dengan harga yg bersaing, industrialisasi substitusi impor, ekspor manufaktur, dan pembatasan impor komoditas pasar

4 Perspektif Ekopol Globalisasi/Ekopol Internasional

2. LIBERAL

- ❖ **Aktor** : individu yg secara rasional memaksimalkan perolehan
- ❖ **Tujuan** : maksimalisasi kesejahteraan global
- ❖ **Sifat hubungan dan sistem** : harmoni dan saling menguntungkan karena adanya rasa saling membutuhkan dan kesamaan antara kepentingan nasional sebuah negara dan kepentingan ekonomi internasional
- ❖ **Peran negara** : sekunder, terbatas sebagai penjamin pasar bebas
- ❖ **Hubungan ekopol** : ekonomi harusnya menentukan politik
- ❖ **Kemungkinan perubahan** : ekopol internasional cenderung keekuilibrium dinamik
- ❖ **Preskripsi** : manfaatkan sistem internasional, tetapi jangan intervensi pasar. Efisiensi akan tercipta karena adanya spesialisasi produksi.

4 Perspektif Ekopol Globalisasi/Ekopol Internasional

3. RADIKAL

Perspektif ini diasumsikan bahwa kelas kapitalis yg menentukan kebijakan negara sehingga ada eksplotasi terhadap kelas buruh, kepentingan materiil mereka yg mendominasi, bahkan kaum Neo Marxis menuding adanya kapitalis internasional

- ❖ **Aktor** : kelas sosial yg saling bersaing
- ❖ **Tujuan** : maksimalisasi kepentingan kelas
- ❖ **Sifat hubungan dan sistem** : konflikktual dan menguntungkan si kuat
- ❖ **Peran negara** : primer → memperjuangkan kepentingan kelas (menjamin kondisi bagi kelestarian kapitalis)
- ❖ **Hubungan ekopol** : ekonomi memang menentukan politik
- ❖ **Kemungkinan perubahan** : ekopol internasional cenderung disequilibrium
- ❖ **Preskripsi** : negara lemah hindarkan diri dari sistem kapitalisme internasional.
Tekankan strategi “autarky”

4 Perspektif Ekopol Globalisasi/Ekopol Internasional

4. REFORMIS

Lebih bersifat internasionalis daripada nasionalis, perspektif ini mengakui negara lemah tereksplorasi maka solusinya adalah reformasi struktur ekonomi internasional.

- ❖ **Aktor** : *nation state* dan unit internasional
- ❖ **Tujuan** : maksimalisasi kesejahteraan global
- ❖ **Sifat hubungan dan sistem** : konfliktual dan saat ini merugikan si lemah, tetapi bisa diperbaiki
- ❖ **Peran negara** : primer → memperjuangkan kepentingan kelompok negara2 ekonomi lemah dalam forum diplomasi internasional
- ❖ **Hubungan ekopol** : timbal balik
- ❖ **Kemungkinan perubahan** : perubahan bisa diarahkan ke reformasi struktur secara damai
- ❖ **Preskripsi** : manfaatkan organisasi internasional untuk : strategi “collective self reliance and collective bargaining”

PERDEBATAN KEBERADAAN GLOBALISASI

POSITIF

1. Lancarnya arus transportasi dan informasi
2. Akses dan alih pengetahuan
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatkan ekspor
5. Harga barang lebih murah

NEGATIF

1. Liberalisasi ekonomi memicu monopoli pasar
2. Masuknya barang impor ke negara berkembang menekan produk dalam negeri, sehingga terjadi lemahnya pertumbuhan, pengangguran (pertanian dan industri)
3. Globalisasi menguntungkan negara maju
4. Globalisasi menyebabkan fluktuasi ekonomi dalam negeri
5. Keberpihakkan lembaga ekonomi internasional

**EKOPOL RADIKAL :
STRUKTURALISME DAN
DEPENDENSIA**

Perdebatan akibat ekopol globalisasi yg timpang

❖ **Kaum kapitalis** → negara yg masih terbelakang bisa terus membuka diri dengan menumbuhkan kapitalisme sepenuhnya (*klasik*) dengan sebuah *line up* pertumbuhan ekonomi (*neo klasik*).

Dengan tiap negara fokus menghasilkan barang yg biaya produksinya rendah dan mengekspor surplus produksi ke luar negeri. Serta mengimpor barang yg lebih murah biayanya daripada diproduksi sendiri. Sehingga tercipta keunggulan absolut dan komparatif yg saling menguntungkan antar negara.

❖ **Kaum Kiri** → adanya dominasi dan eksploitasi dalam moda imperialisme dan kolonialisme di satu sisi dan perjuangan untuk kemerdekaan di sisi lainnya.

Karena kenyataannya harga produk primer yg dihasilkan negara berkembang cenderung kompetitif sehingga harga ditentukan pembeli. Maka yg tercipta adalah barang produksi negara berkembang cenderung murah, sementara produk negara maju cenderung harga tinggi

Paul Presbich

Maka rekomendasi dari ECLA (Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin :

- ❖ Negara berkembang harus menghentikan ekspor bahan mentah
 - ❖ Beralih ke strategi industrialisasi substitusi impor
- ❖ Menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam negeri seperti praktek oligarki politik dan penguasaan tanah oleh segelintir orang
- ❖ Memutuskan hubungan ekopol dengan negara-negara maju dengan melakukan hubungan ekopol antar sesama negara berkembang (Caranya : menerapkan bea tinggi pada produk negara maju, integrasi ekonomi regional negara berkembang, dan membuka pasar bersama)

**Pandangan dari ECLA tersebut
menghasilkan 2 teori ekopol radikal
Yaitu :**

- 1. Ekopol Pendekatan Strukturalisme**
- 2. Ekopol Pendekatan Dependensia**

EKONOMI POLITIK PENDEKATAN STRUKTURALISME

Pendekatan ini dilatari oleh rekomendasi ECLA berupa **ketimpangan harga dan hambatan struktural dalam negeri** termasuk pemerataan pendapatan dan kesempatan akses yg sama pada ekonomi dan politik

Swasono : Strukturalisme adalah paham yg menolak ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan ekonomi yg dilandaskan pada prinsip privatisasi, mekanisme pasar bebas, persaingan sempurna, dan pengutamakan pertumbuhan daripada pemerataan.

Pandangan pendekatan strukturalis terhadap Pertumbuhan

Pertumbuhan hanya akan menimbulkan eksploitasi, pelumpuhan (*disempowerment*), dan pemiskinan serta tidak peduli terhadap harkat manusia.

Kritik Pendekatan Strukturalisme Terhadap Pasar Bebas

- ❖ Sistem modal, produksi, dan perdagangan dalam pasar bebas akan menimbulkan hubungan harta antar pelaku ekonomi yg mapan dengan mengorbankan golongan kelas bawah.
- ❖ Kelompok masyarakat yg tidak memiliki daya beli akan tersingkir.
- ❖ Pasar bebas tidak *omniscient* dan *omnipotent*, tidak *self-regulating* dan *self-correcting*
- ❖ Pasar bebas yg kompetitif hanya akan saling menghancurkan, harusnya adalah konvergensi antara kompetitif dan kerjasama, dimana kompetitifnya adalah berupaya menghasilkan yg terbaik tanpa saling menghancurkan dan menyingkirkan
- ❖ *Invisible hand* tidak akan tercipta karena *homo economicus* akan berubah menjadi *homo homini lupus*. *Invisible hand* hanyalah *imperfect hand* atau bahkan *the dirty hand*. Seharusnya ada *visible hand* yg mengatur pasar demi kepentingan negara dan kemashlatan masyarakat.

Solusi pendekatan Strukturalisme :

- ❖ Maka fokusnya ada pada **restrukturisasi** ekonomi
- ❖ Disertai **pengontrolan** mekanisme pasar oleh pemerintah sehingga menghasilkan “nilai tambah ekonomi” dan nilai tambah “sosiokultural” yg menjangkau partisipasi dan emansipasi kemartabatan.

PENDEKATAN EKOPOL DEPENDENSIA

Asumsi pendekatan ini : dunia sebagai sebuah sistem, negara-negara di dunia terdiri dari yg paling maju hingga yg paling terbelakang, dan pembangunan sebagai sebuah proses unilinear

❖ Paul Baran :

- Kapitalisme mustahil bagi negara berkembang karena polanya berupa **transfer bisnis monopolistik dari negara-negara maju**. Sehingga hambatan internal tidak hilang, malah memberi keuntungan bagi aristokrasi agraria dan oligarki lokal.
- Investasi MNC's mmg dapat meningkatkan pendapatan nasional negara terbelakang, namun **tidak ada pemerataan pendapatan**. Yang terjadi adalah perubahan pola orientasi dari upaya mencukupi kebutuhan pasar internal menjadi **orientasi memenuhi pasar luar negeri**
- Kapitalisme hanya **mengintroduksi ketimpangan ekonomi dan sosial** yg melekat dalam sistem kapitalis

PENDEKATAN EKOPOL DEPENDENSIA

- ❖ **Andre Gunder Frank** : Negara *Metropolis-Satelite*
 - Hubungan ketergantungannya yaitu : **Negara metropolis mengontrol perdagangan di negara satelit.**
 - Lokus saling ketergantungan ada pada hubungan antar negara sebagai sebuah sistem kapitalis dunia. **Dimana kelas-kelas dipahami sebagai bagian dari struktur kekuasaan, dan negara2 berupaya utk mendapatkan manfaat dari *extractive power* posisi tsb.**
 - **Keterbelakangan di negara satelit harus dipahami dari kondisi awal, kondisi khuluk, dan perkembangan kapitalisme. Karena hasil keterbelakangan ini dipicu oleh karakteristik ekonomi, politik, dan sosio kultural**
 - **Kondisi ketergantungan ini bermula dari kekuatan senjata → pembentukan struktur ketergantungan.**

PENDEKATAN EKOPOL DEPENDENSIA

❖ Andre Gunder Frank :

- Menurutnya kondisi negara terbelakang saat ini bukanlah kondisi awal pembangunan, yg pernah dialami negara maju.
- **Kerugian negara berkembang**
 - Tidak memiliki kontrol atas perekonomian sendiri.
 - Negara terbelakang tidak menerima manfaat materi dari hubungan saling ketergantungan ini.
- Penerima keuntungan adalah kaum **borjuis lokal** – *comprador*.
Mereka mengembangkan industrialisasi yg dikontrol metropolis.

❖ **Samir Amin** : *Negara Sentral VS Negara Periferi*

- Menurutnya negara sentral dan periferi saling beroposisi, dimana pembangunan di **negara sentral akan memblokir pembangunan di negara periferi**
- Negara sentral dan periferi melalui tahap Merkantilis, Premonopsoni / Kompetitif, hingga tahap Kapitalisme Imperialis. Dikotomi paling terlihat ada pada tahap kapitalis imperialis.

❖ **Theonio Dos Santos :**

- Menurutnya ketergantungan adalah kondisi dimana **perekonomian sekelompok negara dikondisikan oleh pembangunan dan ekspansi sekelompok negara lain.**
- Sehingga **perkembangan sebuah negara adalah refleksi dari negara lain yg lebih dominan.**
- Ketergantungan juga selain disebabkan oleh faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal → **Ketergantungan Kolonial, Ketergantungan Industrial-finansial, Dan Ketergantungan Teknologi Industri.**

Kritik Atas Pendekatan Dependensia :

- ❖ Dependensia terlalu memfokuskan diri pada faktor eksternal.
- ❖ Dependensia menuding pengaruh kolonialisme dan interaksi dengan negara maju sebagai pemicu ketergantungan, bagaimana dengan negara yg tidak pernah dijajah dan yg terisolasi?.
- ❖ Negara industri baru di Asia Timur tetap berinteraksi dengan negara maju dan bekas kolonialism, namun bisa maju.

PEMBANGUNAN DI NEGARA INDUSTRI BARU

- ❖ Negara industri baru mengembangkan kapitalisme yg disesuaikan dengan kondisi sosio kultural negaranya dengan intervensi pemerintah.
- ❖ Negara industri baru meniru pembangunan *non komunis* ala Rostow dengan mengandalkan bantuan modal, teknis, dan manajemen dari negara maju.
- ❖ Pembangunan di negara industri baru menitikberatkan pada **Substitusi Impor (*inward looking*) dan Strategi Promosi Ekspor (*outward looking*)**.
 - Substitusi impor = orientasi pasar domestik dengan memproduksi barang2 pengganti impor.
 - Strategi promosi ekspor = usaha pengembangan industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional. 1). Menjadi perakit, 2). Membuat barang yg persis sama, 3). Meningkatkan kualitas yg tidak ada pada barang yg persis sama, 4). Mulai mengubah desain agar lebih bermutu, indah/ bersaing pada aspek estetika, 5). Melakukan penelitian dan pengembangan inovasi baru.

SOLUSI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MENURUT SUMITRO

- ❖ Melaksanakan usaha produktif melalui kebijakan ekonomi dan keuangan yg tepat pada akar rumput
- ❖ Memperluas lapangan kerja dengan menggiatkan sumber2 baru
- ❖ Keseimbangan antara sektor agraria dan industri, akan terwujud jika ada perubahan struktur ekonomi
- ❖ Pemerintah harus mengawasi proses produksi dan pembagian hasil produksi serta mengatur kekuatan proses produksi golongan lemah agar terhindar dari eksploitasi kaum kuat
- ❖ Intervensi pemerintah dalam pasar utk menghindarkan keganjilan pasar yg dapat merugikan kepentingan umum

EKONOMI POLITIK
KELEMBAGAAAN
Institutional Political Economy

*Ekonomi murni
menganggap dirinya
merupakan disiplin
ilmu sendiri
(partikular)*

*Ekopol kelembagaan
menganalisis masalah
ekonomi berdasarkan
pendekatan ilmu
sosial lainnya
(komprehensif)*

Pentingnya Ekopol Kelembagaan

Ilmu ekonomi murni hanya memusatkan upaya untuk mengatasi **kelangkaan** diselesaikan melalui mekanisme pasar dan mengabaikan pengaruh sosial lainnya, yang cenderung menghasilkan **kompetisi dan konflik**

Padahal bentuk dan cara kegiatan ekonomi ditentukan oleh **sistem sosial politik (institusi sosial)**, termasuk hubungan distribusi kekuasaan.

Sistem sosial politik merupakan implementasi dari konsensus dan norma yg berlaku yg pada akhirnya **memotivasi** individu dalam peristiwa sosial tertentu, termasuk ekonomi.

Perbedaan Ekopol Kelembagaan VS Ekonomi Murni

EKOPOL KELEMBAGAAN	EKONOMI MURNI
Pendekatan komprehensif	Pendekatan partikular
Fokus pada peristiwa apa yg terjadi, mengapa dan bagaimana seharusnya kegiatan ekonomi	Fokus pada seluk beluk pasar
Ideologi, norma dan nilai sbgai fenomena sosial yg turut mempengaruhi kegiatan ekonomi	Menganggap ideologi, norma, dan nilai sebagai faktor emosi yg bersifat <i>given</i>
Kegiatan sosial yg menentukan pilihan publik	Pilihan publik ditentukan oleh harga dan pendapatan
Idealistik	Materialistik
Observasi biaya transaksi dan kebijakan publik	Observasi komoditas dan harga
Kepentingan umum selain kepentingan pribadi	Kepentingan pribadi

Defenisi

Thorstein Veblen : Ekopol kelembagaan adalah perilaku mengonsumsi dan memproduksi merupakan perilaku masyarakat yg ditentukan oleh norma-norma kelembagaan

...settled habits of thought common to the generality of men

...a custom, practice, relationship, or behavioral pattern of importance in the life of community or society

Peran Nilai-nilai Dan Norma (Thorsetein Veblen)

Keadaan dan lingkungan (intitusi sosial) terpengaruh oleh nilai, norma, kebiasaan, dan budaya sehingga mempengaruhi perilaku ekonomi

- ❖ Keadaan dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi, sebab struktur politik dan sosial yg tidak mendukung dapat menyebabkan distorsi ekonomi.
- ❖ Perilaku masyarakat bisa berubah, disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan.

Contoh : faktor emosional – suka pamer, membuat manusia *conspicuous consumption*

- ❖ Pendekatan klasik/neo klasik fokus pada *production for use*, sehingga harga ditentukan kualitas. Namun sekarang *production for profit* sehingga trik-trik licik sering digunakan.
- ❖ Veblen juga mengkritik kegiatan di pasar modal yg dianggapnya menyimpang dari tujuan kegiatan ekonomi.

Peran Wirausahawan (Weber, Schumpeter, dan Myrdal)

Wirausahawan tidak berfokus pada modal sebagai faktor utama dalam ekonomi tetapi inovasi dan kreatifitas dalam menghasilkan barang

- ❖ Tindakan manusia dalam ekonomi bukan terjadi dalam ruang otonom yg hampa, tetapi kalkulasi dari jaringan relasi sosial yg institusional
- ❖ Termasuk peran negara dalam pembangunan ekonomi jangka panjang, ideologi yg dianut, dan masalah sosial lainnya, berperan dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi
- ❖ Kelompok wirausahawan yg memicu industrialisasi dan modernisasi lahir karena adanya situasi sosial politik yg memungkinkan peluang. Contohnya masyarakat kapitalis di Eropa yg hadir akibat *Protestan Ethic*.
- ❖ Maka kesimpulan Weber, jiwa wirausaha itu tidak dimiliki semua manusia, tergantung pada aktivitas dan struktur yg ada di belakang kegiatan ekonomi.

Peran Hukum (Commons, Coasae, Dan North)

Sistem ekonomi ditentukan oleh hukum yg membingkainya

- ❖ Hukum mengatur pola interaksi antar berbagai aktor dalam sistem ekonomi, dan mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi
- ❖ North → pelaku ekonomi boleh saja memaksimalkan segala sesuatu, tetapi dibatasi oleh tidak hanya sumber daya, tetapi juga institusi yg berlaku dalam masyarakat (nilai-norma-hukum)
- ❖ Pasar hanya akan efektif jika ada aturan main (hukum) yg dapat mengurangi ketidakpastian
- ❖ Institusi harus dibangun, direkayasa, dikonstruksikan, dikembangkan, dan dijaga keberadaannya, serta ditegakkan aturan mainnya agar tidak terjadi penyimpangan aturan main yg akan membuat sistem ekonomi tidak stabil
- ❖ Contoh : hukum hak paten, hak cipta, hukum kontrak, merek dagang,, dan kepemilikan.

3 Bentuk Kelembagaan dalam Ekopol

1. **Kelembagaan Sbg Norma & Konvensi** : Hasil konsensus bersama atas perilaku manusia yg bersifat informal dan ditegakkan oleh keluarga, masyarakat, adat, dll. Jika dilanggar akan menimbulkan kekacauan.
2. **Kelembagaan Sbg Aturan Main** : Merupakan aturan yg melindungi/menaungi dan sanksi terhadap individu. Cirinya : adanya struktu yg didasarkan pada interaksi individu, pemahaman akan nilai, dan tekanan utk berperilaku sesuai kesepakatan
3. **Kelembagaan Sbg Hub. Kepemilikan** : Sbg pengatur hubungan kepemilikan berupa : individu atau kelompok pemilik,objek nilai bagi pemilik dan orang lain, dan orang/pihak lain yg terlibat dalam kepemilikan. 3 elemen hak dalam kepemilikan : hak eksklusif utk memilih penggunaan suatu sumber daya, hak untuk menerima manfaat dari sumber daya yg dimiliki, dan hak untuk menukarkan sumber daya yg dimiliki sesuai dengan persyaratan yg disepakati

Aturan Kelembagaan Dalam Kepemilikan :

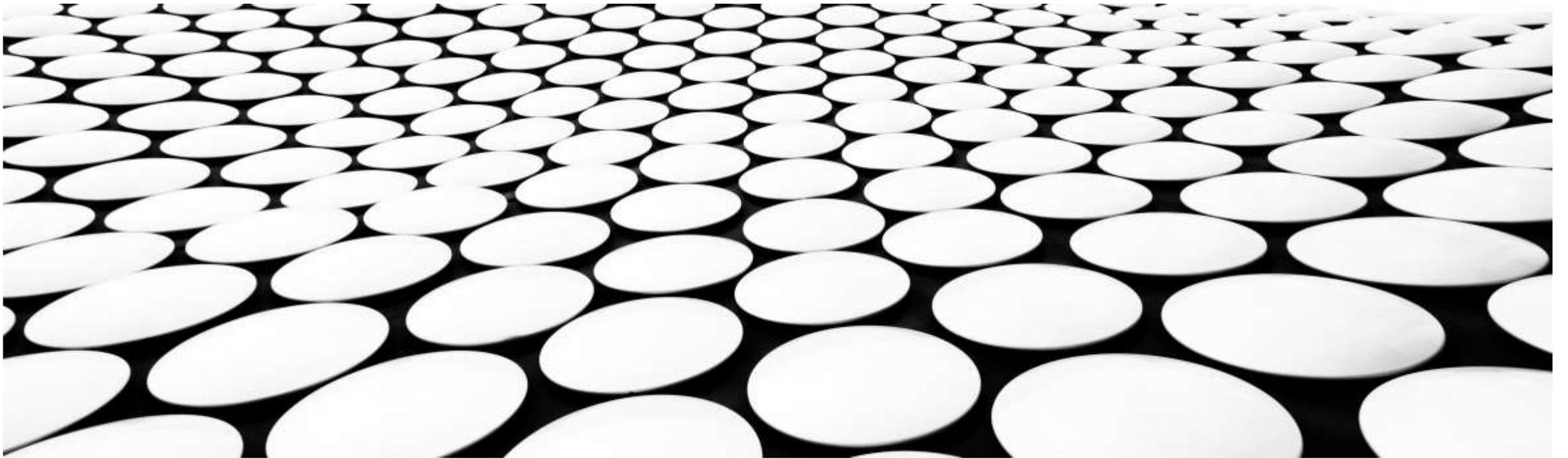
- 1. Milik Negara :** diperoleh karena kekuasaan wewenang yg sah
- 2. Milik Bersama :** kekayaan sekelompok orang yg diwariskan seperti tanah ulayat, hutan, sungai, danau atau padang utk peternakan komunitas
- 3. Milik Privat :** kepemilikan individu yg bisa ditransfer kepada orang lain
- 4. Bukan Milik Siapa-siapa :** barang yg jumlahnya melimpah, dan pengonsumsianya oleh semua orang dan tidak berkurang manfaatnya.

Kesimpulan...

Pembahasan ekopol kelembagaan harus melihat format hubungan antara swasta, masyarakat, organisasi buruh, partai politik, pemerintah, lembaga konsumen, dan kelompok kepentingan

Pasar persaingan sempurna anjuran pendekatan klasik/neo klasik, akan terwujud jika setiap orang memiliki informasi yg sempurna, rasional 100 %, berperilaku jujur dan tidak oportunistis, maka semua itu ditentukan oleh kelembagaan (keadaan dan lingkungan sosial politik) bukan harga dan pendapatan atau apa yg diproduksi.

EKONOMI POLITIK INDONESIA





EKOPOL ORDE LAMA

❖ *Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Demokrasi → 1945-1950*

- ❖ *Kas negara kosong, berlaku 3 mata uang (Hindian Belanda, Javasche Bank, dan Jepang), inflasi, perdagangan luar negeri mati karena blokade laut oleh Belanda.*
- ❖ *Kemandirian ekonomi menjadi semangat yg mendasari : 1946 dibentuk BI, pinjaman nasional pertama untuk subsidi ekonomi kerakyatan, tenaga militer dialihkan ke bidang produktif, dan upaya swasembada pangan.*

❖ *Ekonomi Liberalis* → awal 1950 – 1957

- ❖ *Ekonomi pasar yg berlaku → malah memperburuk keadaan karena belum mapannya pelaku ekonomi lokal.*
- ❖ *Tidak didukung oleh stabilitas politik, pertumbuhan penduduk tinggi, utang negara yang besar Rp 3 triliyun, minimnya ahli ekonomi, dan defisit negara yang besar karena besarnya pengeluaran negara.*
- ❖ *Kebijakannya :*
 - ✓ *Pemotongan nilai mata uang/devaluasi.*
 - ✓ *Ekspor : nilai tukar Rupiah terhadap 1 Dollar, dari Rp 3,80 menjadi Rp 7,60*
 - ✓ *Impor : 1 Dollar menjadi Rp 11,40*
 - ✓ *Dilakukannya Musyawarah pembangunan nasional dan penetapan rencana pembangunan 5 tahun.*
 - ✓ *Nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda, Program Ekonomi Benteng (pinjaman dan kredit bagi pengusaha pribumi-UKM), dan sistem Ali-Baba.*

-
- ❖ *Ekonomi Etatisme → awal 1958 – Orde Baru*
 - ❖ *Dibentuknya Bappenas – lahirnya UU Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan.*
 - ❖ *Devaluasi : 500-50, 1000-100. tujuannya utk meningkatkan nilai mata uang, dan mengurangi jumlah uang yg beredar di masyarakat namun menyebabkan inflasi.*
 - ❖ *Manipol- USDEK (Manipol = Manifesto Politik; USDEK = UUD 44, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia).*
 - ❖ *Slogan Trisakti : Berdaulat di bidang Politik, Berdikari di bidang Ekonomi, Berkepribadian di bidang Budaya.*
 - ❖ *Landasannya : Pancasila, Marhaenisme, Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis).*

Semuanya bertema sama, yaitu condong pada sosialisme dan kontrol yang terpusat.

-
- ❖ Politik diwarnai aksi dan pidato ideologis dan penuh dengan slogan yg tidak punya arti konstruktif bagi pembangunan
 - ❖ Penolakan terhadap kapitalisme akibat pengalaman masa lalu yang Imperialis → adanya anggapan kemiskinan saat itu adalah akibat penerapan kapitalisme
 - ❖ Namun tidak didukung dengan struktur kekuatan ekonomi
 - Pengangguran di perkotaan meningkat menjadi 8.5% pada awal 1960
 - Merosotnya ekspor hasil perkebunan yg merupakan warisan kolonialisme
 - Kenaikan harga dibandingkan *money supply*

Dampaknya = hiper-inflasi tahun 1966 – 1967

Kesimpulan Penyebab Gagalnya Ekopol Orde Lama :

1. Ketidakstabilan politik → konflik vertikal dan horizontal
2. Etatisme melemahkan kemampuan ekonomi pasar.
3. Menolak terlibat dalam kapitalisme internasional → Stabilisasi ekonomi diciptakan dengan mengisolasi diri dari interaksi dengan asing serta diberlakukannya otonomi daerah
4. Negara-negara sosialis yg menjadi “kawan” tidak memiliki mata uang yang kuat
5. Lemahnya aspek teknis dan administratif dibandingkan politik berbiaya besar
6. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda → berujung pada kebangkrutan
7. *Land-reform* 1960 yang membatasi kepemilikan tanah pertanian 5 sampai 20 hektar saja → minimnya produksi → borjuasi lokal lemah.



EKOPOL ORDE BARU

-
- ❖ Tidak lagi melihat kenyataan masa lalu dan tidak menolak kapitalisme → kapitalisme menjadi “*partner*” untuk memperkuat posisi politik.
 - ❖ Menyadari pentingnya penguasaan dan pertumbuhan kekayaan material bagi “kepentingan” bangsa → *Industrializing Ideology*
 - ❖ Pemerintah menerapkan *outward-looking strategy* di bawah pengaruh neoklasik
 - Melakukan pinjaman luar negeri
 - Memperketat kredit dan peredaran uang
 - Liberalisasi perdagangan valuta asing
 - ❖ Pada awal Orde Baru produksi pangan dan sandang dikuasai pemerintah, industri dan pertambangan diberikan pada modal asing

Diterapkannya Pembangunan Lima Tahun (Pelita)

- 1. Pelita I (1969-1974) :** Pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
- 2. Pelita II (1974-1979) :** Pangan, sandang, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Hasilnya → pertumbuhan ekonomi 7%, perbaikan irigasi, kenaikan produksi, dan meningkatnya infrastruktur jalan.
- 3. Pelita III (1979-1984) :** Berpedoman pada Trilogi Pembangunan (Stabilitas Nasional yang dinamis, Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, dan Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya), dalam bentuk pemerataan kebutuhan pokok, Pendidikan, Kesehatan, upah, kesempatan kerja, dan penyebaran penduduk.
- 4. Pelita IV (1984-1989) :** swasembada pangan, dan industri.
- 5. Pelita V (1989-1994) :** Pertanian dan industri. Pertumbuhan rata-rata 6.8% per tahun.
- 6. Pelita VI (1994-1999) :** pertanian, industri, dan SDM.

Hasilnya

- ❖ Politik bergerak lambat ke arah demokrasi, namun kebijakan pangan mampu membawa Indonesia keluar dari ketergantungan pangan impor
- ❖ 80 an - 1996 pertumbuhan ekonomi 7 % per tahun
- ❖ *Industrializing ideology yang state centered* telah membawa dampak perubahan secara fisik pada bidang ekonomi maupun sosial-politik dibandingkan orde lama
 - Praktik simbolik Orde Lama tak lagi diperlukan karena masyarakat difokuskan pada pembangunan kesejahteraan
 - Kekayaan masyarakat tidak lagi bergantung pada kepemilikan tanah dan posisi birokratis

KRITIK :

- ❖ Awal Orde Baru Industrialisasi gagal karena hampir tidak adanya kelas sosial-politik lokal maupun kelembagaan yg mampu berpartisipasi dalam pembangunan material.
- ❖ Aktor-aktor swasta tidak mampu berkembang sebagai industriawan namun hanya sbg pedagang menengah serta kelompok petani pedesaan.
- ❖ Negara menjadi aktor dari kegiatan ekonomi asing di dalam negeri maupun sumber penerimaan domestik lainnya
- ❖ Negara menjadi aktor utama pembangunan ekonomi → utk menunjangnya dilakukanlah “rekayasa sosial” yg kondusif (memperkuat posisi sosial-politik militer dan depolitisasi kekuatan di luar negara/penguasa)
- ❖ Upaya keadilan sosial terhambat akibat dominasi elit dan oligarki yg massif dan KKN.



EKOPOL PASCA REFORMASI

Penyebab krisis 1998 :

- ❖ Depresiasi Rupiah terhadap US Dollar
- ❖ Hutang luar negeri oleh swasta tidak terkontrol
- ❖ Hutang oleh swasta tidak dilaporkan sebagai sebuah kewajiban
- ❖ 11 Bank swasta terpaksa ditutup, hutang mereka menjadi hutang negara, dengan imbasnya adalah aset bank menjadi milik pemerintah
- ❖ Keluarnya modal asing yang berinvestasi di Indonesia
- ❖ Merajalelanya KKN sehingga kas negara dan bea cukai nihil



BENTUK-BENTUK EKOPOL REFORMASI :

- Ekonomi memiliki kecenderungan terhadap pasar bebas.
- Adanya subsidi bagi UKM.
- Pengelolaan SDA masih didominasi perusahaan asing.
- Desentralisasi politik dan pemerintahan memicu desentralisasi ekonomi.
- Stabilitas politik rentan.
- Nilai tukar rupiah merosot.

KRITIKAN :

- ❖ Liberalisasi ekonomi akibat lemahnya *design* praktikal dari kaum sosial demokrat, melahirkan monopoli ekonomi borjuasi.
- ❖ Ekonomi kapitalistik tidak banyak berubah, selain ditambah dengan praktek neoliberalisme melalui keterlibatan dalam ekopol globalisasi.
- ❖ Permodalan usaha dalam negeri menyebabkan ketergantungan pada akumulasi modal asing melalui investasi dan hutang.
- ❖ Pelaksanaan pemilu langsung (1 periode 5 tahun) → dampaknya pada ekonomi adalah tidak terskemanya perencanaan pembangunan ekonomi
- ❖ Pembatasan kekuasaan dengan melakukan distribusi kekuasaan (pembagian, pemisahan), Kebebasan berpolitik, dan Pers yg bebas **jauh dari substansi.**

**SEBENARNYA EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN UUD
1945 ADALAH DIHARUSKANNYA MENERAPKAN EKONOMI
PANCASILA**

**APA ITU EKONOMI PANCASILA?
BAGAIMANA BENTUK PENERAPANNYA?
APA SAJA KEBIJAKANNYA?
BAGAIMANA PERAN MASYARAKAT?**

